

**PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH (STUDI PADA OPD KOTA TANJUNGBALAI)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : ELLEN ANGELINA
NPM : 2005170002
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ELLEN ANGELINA
NPM : 2005170002
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian: PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA OPD KOTA TANJUNGBALAI)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak, CA)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris



(Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : ELLEN ANGELINA
NPM : 2005170002
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA OPD KOTA TANJUNGBALAI)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, 14 - 8 - 2024

Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. Januri, SE., M.Si., M.M., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : ELLEN ANGELINA
N P M : 2005170002
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA OPD KOTA TANJUNGBALAI)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|-------------------------------|--|---------|-------------|
| Bab 1 | — | | |
| Bab 2 | — | | |
| Bab 3 | uji validitas dan uji reliabilitas telah ada. | 27/7/24 | 3/1 |
| Bab 4 | Rum usang untuk data buany yg tidak valid. pembaruan diperbaiki deskriptor | 27/7/24 | 3/1 |
| Bab 5 | kesimpulan perbaikan | 27/7/24 | 3/1 |
| Daftar Pustaka | Sitasi dosen dan umum | 27/7/24 | 3/1 |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | | | |

Medan, Juli 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : ELLEN ANGELINA
N P M : 2005170002
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA OPD KOTA TANJUNGBALAI)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|-------------------------------|--|---------|-------------|
| Bab 1 | — | | |
| Bab 2 | — | | |
| Bab 3 | — | | |
| Bab 4 | Rum ulang lagi, buany data yg tidak valid. penjabaran lebih detail | 6/8 24 | 3/1 |
| Bab 5 | kesimpulan lebih lengkap | 6/8 24 | 4/1 |
| Daftar Pustaka | lihat status dosen | 6/8 24 | 4/1 |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | — | | |

Medan, Agustus 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : ELLEN ANGELINA
N P M : 2005170002
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA OPD KOTA TANJUNGBALAI)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|-------------------------------|--|---------|-------------|
| Bab 1 | — | | |
| Bab 2 | — | | |
| Bab 3 | — | | |
| Bab 4 | Pembahasan jumlah laporan lebih di diperoleh dari faktor lokasi masalah keuntungan | 13/8/24 | 3/ |
| Bab 5 | kesimpulan masalah | 13/8/24 | 3/ |
| Daftar Pustaka | — | | |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | Ace tugas akhir lengkap ke sidang | 14/8/24 | 3/ |

Medan, Agustus 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ellen Angelina

NPM : 2005170002

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Penelitian : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota Tanjungbalai)

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2024

Saya yang Menyatakan

Ellen Angelina

ABSTRAK

PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA OPD KOTA TANJUNGBALAI)

ELLEN ANGELINA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: ellen.angelina06@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh – pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota Tanjungbalai). Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, dengan jenis penelitian kuantitatif dan sumber data primer yang di peroleh dari penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD di Kota Tanjungbalai berjumlah 34 OPD. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teknik probability sampling atau random sampling yaitu accidental sampling dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh pupulasi dan melihat dari 34 OPD yang merespon kuesioner tersebut. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan program software smart PLS (Partial Least Square). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Opd Kota Tanjungbalai, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pengawasan Internal pada Organisasi Perangkat Daerah maka akan semakin baik Kinerja Pemerintah Daerah. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Opd Kota Tanjungbalai, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Akuntabilitas pada Organisasi Perangkat Daerah maka akan semakin baik Kinerja Pemerintah Daerah. Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Opd Kota Tanjungbalai, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Transparansi pada Organisasi Perangkat Daerah maka akan semakin baik Kinerja Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Pengawasan Internal, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE (STUDY ON TANJUNGBALAI CITY OPD)

ELLEN ANGELINA

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
University of Muhammadiyah North Sumatra
Email: ellen.angelina06@gmail.com

The purpose of this study was to test and analyze the effects of Internal Control, Accountability and Transparency on Local Government Performance (Study on Tanjungbalai City OPD). This study uses an associative approach, with a type of quantitative research and primary data sources obtained from distributing questionnaires. The population in this study were all OPDs in Tanjungbalai City totaling 34 OPD. The sampling technique in this study is to use probability sampling or random sampling techniques, namely accidental sampling by distributing questionnaires to all populations and seeing 34 OPD that respond to the questionnaire. The analysis technique used in this study used the PLS (Partial Least Square) smart software program. Based on the results of the study, it is concluded that Internal Supervision has a positive effect on Local Government Performance in Tanjungbalai City Opd, this shows that the better the Internal Supervision in the Regional Apparatus Organization, the better the Local Government Performance. Accountability has a positive effect on Local Government Performance in Tanjungbalai City Opd, this shows that the better the Accountability in the Regional Apparatus Organization, the better the Local Government Performance. Transparency has a positive effect on Local Government Performance in Tanjungbalai City Opd, this shows that the better the Transparency in the Regional Apparatus Organization, the better the Local Government Performance.

Keywords: Internal Control, Accountability, Transparency, Local Government Performance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun tugas akhir ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kota Tanjungbalai)”**.

Tugas akhir ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Pendidikan Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda tercinta SYAFRIL dan Ibunda RATNA tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih pendidikan yang layak hingga bangku perkuliahan, dan abangda tercinta penulis DIAN yang selalu memberikan dukungan untuk pengerjaan tugas akhir ini dengan baik.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini mulai dari proses awal sampai proses akhir penyelesaian, penulis telah banyak menerima bantuan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri S.E., M.M., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA. selaku dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya.

8. Bapak dan Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik saya selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa-masa yang akan datang.

Amin Ya Rabbal'alamin
Billahi fii sabilil Haq Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2024

ELLEN ANGELINA
Npm:2005170002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 9 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| 2.1. Landasan Teori | 11 |
| 2.1.1. Kinerja Pemerintah Daerah | 11 |
| 2.1.2. Pengawasan Internal | 18 |
| 2.1.3. Akuntabilitas | 23 |
| 2.1.4. Transparansi | 28 |
| 2.1.5. Penelitian Terdahulu..... | 34 |
| 2.2. Kerangka Konseptual | 35 |
| 2.2.1 Pengaruh Langsung Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah | 35 |
| 2.2.2 Pengaruh Langsung Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..... | 36 |
| 2.2.3 Pengaruh Langsung Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..... | 37 |
| 2.3. Hipotesis | 38 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 39 |
| 3.2. Definisi Operasional | 39 |
| 3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian | 41 |
| 3.3.1. Tempat Penelitian..... | 41 |
| 3.3.2. Waktu Penelitian | 41 |
| 3.4. Populasi dan Sampel..... | 42 |
| 3.4.1. Populasi..... | 42 |
| 3.4.2. Sampel..... | 43 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| 3.6. Teknik Analisis Data..... | 47 |
| 3.6.1. Analisis Model Pengukuran (Outer Models) | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 3.6.2. Analisis Model Struktural (Inner Models) | 48 |
| 3.6.3. Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural..... | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 51 |
| 4.1. Deskripsi Data | 51 |
| 4.1.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner..... | 51 |
| 4.1.2. Identitas Responden..... | 52 |
| 4.1.3. Identitas Berdasarkan Umur | 52 |
| 4.1.4. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 52 |
| 4.1.5. Identitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 53 |
| 4.1.6. Identitas Berdasarkan Lama Kerja | 53 |
| 4.1.7. Deskripsi Hasil Penelitian | 54 |
| 4.1.8. Deskripsi Variabel Kinerja Pemerintah Daerah..... | 55 |
| 4.1.9. Deskripsi Variabel Pengawasan internal..... | 57 |
| 4.1.10. Deskripsi Variabel Akuntabilitas..... | 59 |
| 4.1.11. Deskripsi Variabel Transparansi..... | 62 |
| 4.2. Analisis Data | 64 |
| 4.2.1. Analisis Model Pengukuran (Outer Model) | 64 |
| 4.2.1. Analisis Model Struktural (Inner Model)..... | 71 |
| 4.3. Pembahasan | 76 |
| 4.3.1. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..... | 76 |
| 4.3.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..... | 78 |
| 4.3.3. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..... | 81 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| 5.1. Kesimpulan | 84 |
| 5.2. Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Capaian Kinerja 2020 – 2022 | 3 |
| Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu | 34 |
| Tabel 3. 1. Operasional Variabel Penelitian..... | 40 |
| Tabel 3. 2. Jadwal Penelitian | 41 |
| Tabel 3. 3. Populasi dan Sampel Penelitian OPD Kota Tanjungbalai | 42 |
| Tabel 3. 4. Skala Likert..... | 44 |
| Tabel 3. 5 Uji Validitas | 44 |
| Tabel 3. 6 Uji Realibilitas | 46 |
| Tabel 4. 1. Tingkat Pengambalian Kuesioner | 51 |
| Tabel 4. 2. Umur Responden | 52 |
| Tabel 4. 3. Jenis Kelamin Responden..... | 52 |
| Tabel 4. 4. Pendidikan Terakhir Responden | 53 |
| Tabel 4. 5. Lama Kerja Responden..... | 53 |
| Tabel 4. 6. Skala Interval | 54 |
| Tabel 4. 7. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah | 55 |
| Tabel 4. 8. Variabel Pengawasan Internal | 57 |
| Tabel 4. 9. Variabel Akuntabilitas..... | 60 |
| Tabel 4. 10. Variabel Transparansi..... | 62 |
| Tabel 4. 11. Validitas Konvergen | 64 |
| Tabel 4. 12. Cross Loading Tahap I..... | 67 |
| Tabel 4. 13. Cross Loading Tahap II..... | 68 |
| Tabel 4. 14. Validitas dan Realibilitas Konstruk..... | 70 |
| Tabel 4. 15. Kolinearitas | 71 |
| Tabel 4. 16. R-Square | 72 |
| Tabel 4. 17. F-Square | 73 |
| Tabel 4. 18. Pengaruh Langsung (Direct Effect) | 75 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual | 37 |
| Gambar 3. 1. Model Struktural PLS | 50 |
| Gambar 4. 1. Diagram Kinerja Pemerintah Daerah..... | 57 |
| Gambar 4. 2. Diagram Pengawasan Internal | 59 |
| Gambar 4. 3. Diagram Akuntabilitas | 61 |
| Gambar 4. 4. Diagram Transparansi..... | 63 |
| Gambar 4. 5. Outer Loading..... | 66 |
| Gambar 4. 6. Cross Loading..... | 69 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Kuesioner | 90 |
| Lampiran 2. Data Responden | 96 |
| Lampiran 3. Tabulasi Data Responden | 98 |
| Lampiran 4. Indicators..... | 105 |
| Lampiran 5. Correlations..... | 105 |
| Lampiran 6. Raw Data..... | 106 |
| Lampiran 7. Outer Loadings..... | 106 |
| Lampiran 8. Cross Loading | 107 |
| Lampiran 9. Construct realibility and validity..... | 107 |
| Lampiran 10. Collinearity Statitistics..... | 108 |
| Lampiran 11. R-square | 108 |
| Lampiran 12. F-square..... | 108 |
| Lampiran 13. Uji Hipotesis (Direct effect)..... | 109 |
| Lampiran 14. Histogram direct effect..... | 109 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini penyelenggaraan organisasi publik berdasarkan tata kelola yang baik menjadi suatu keharusan karena dengan adanya pedoman dan arah yang jelas dalam pengelolaan, di harapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan organisasi. Tuntutan penerapan tata kelola yang baik menjadi keharusan dan berlaku bagi setiap organisasi khususnya di sektor pemerintahan. Organisasi perangkat daerah adalah unit organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu dalam suatu pemerintah daerah. Organisasi perangkat daerah biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan struktur organisasi pemerintahan daerah untuk mengelola dan melaksanakan program – program serta kegiatan yang menjadi kewenangannya.

Dalam organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Edowai et al., 2021).

Keberhasilan suatu organisasi bukan hanya tergantung pada bagaimana organisasi tersebut melaksanakan proses dan aktivitas nya, akan tetapi bagaimana kegiatan dan aktivitas tersebut berada dalam kerangka perencanaan strategis. Peningkatan efisiensi dan efektivitas yang mendorong kearah inovasi memerlukan usaha – usaha yang terencana dengan baik dan terjamin .

Pengukuran kinerja sangat penting baik bagi pihak yang memberikan wewenang maupun yang diberi wewenang. Bagi pemberi wewenang, pengukuran dapat digunakan untuk menilai kinerja para penyelenggara organisasi, sedangkan bagi yang diberi wewenang pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang yang telah dipercayakan kepadanya. Selain itu, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi mereka untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang telah diraihinya (Johan, 2017)

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Mahsun et al., 2015)

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jawaban dari Visi, Misi dan Tujuan Strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah (Rizki & Rialdy, 2023)

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sari et al., 2020)

**Tabel 1. 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai
Capaian Kinerja 2020 – 2022**

| No | Sasaran Strategis | Capaian Kinerja 2020 | Capaian Kinerja 2021 | Capaian Kinerja 2022 |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan | B | C | B |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | SB | SB | SK |
| 3 | Meningkatnya keimanan dan Ketaqwaan Aparatur dan Masyarakat | SB | SB | C |
| 4 | Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Daerah | B | B | SB |
| 5 | Meningkatnya Daya Saing Pelaku Usaha dan Ketenagakerjaan Yang Mendukung Daya Saing Daerah | SB | SB | SB |
| 6 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | SB | B | SK |
| 7 | Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumber daya pendidikan yang berkualitas | SB | SB | SB |
| 8 | Meningkatnya sistem dan akses layanan Kesehatan serta sumber daya Kesehatan yang berkualitas | SB | SB | SB |
| 9 | Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas infrastruktur public | C | B | SB |
| 10 | Meningkatnya penataan Kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim | B | SB | B |
| 11 | Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial Masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum | B | SK | SB |
| 12 | Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Masyarakat | C | C | B |

Sumber: laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota tanjungbalai

Berdasarkan tabel LAKIP diatas, dapat dijelaskan bahwa keadaan kinerja instansi di Kota Tanjungbalai sudah baik, diperoleh masih ada rendahnya kinerja dalam 3 tahun belakang terkait Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatkan keimanan dan

Ketaqwaan Aparatur dan Masyarakat dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang kurang baik dan masih perlu adanya perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar untuk meningkatkan kinerja instansi pada pemerintahan kota Tanjungbalai terlihat pada poin nomor 2, 3, dan 6 pada strategis sasaran.

Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mewujudkan misi adalah bahwa semakin tumbuhnya kesadaran dan semangat aparatur untuk menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, dukungan kebijakan mengenai transparansi dan penerapan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan perkembangan teknologi dan informasi. Namun masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang disebabkan karena masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja dan disiplin aparatur serta masih minimnya inovasi layanan yang diberikan (Sumber: Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Disamping itu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya goodgovernance, dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja (SAKIP) berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Pengawasan internal ini diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengawasan intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Maka pada dasarnya pengawasan intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan (Jatmiko, 2020)

Fenomena pengawasan Internal ada beberapa poin yang menjelaskan tak memadainya kondisi Perusahaan karena dugaan menyelewengkan anggaran di PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, diantaranya: penagihan piutang pelanggan yang belum berjalan secara optimal, adanya penerimaan rekening air yang tidak disetorkan ke rekening pdam pada bank sumut. Selanjutnya pengelolaan pengeluaran belanja PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai tidak sesuai dengan ketentuan yakni menyangkut mekanismenya berupa pengeluaran belanja dengan voucher yang tidak di dukung bukti lengkap dan sah. Selain itu upah pekerjaan tidak dihitung berdasarkan analisa harga satuan orang/hari. Beberapa item pekerjaan menurut penilaian terindikasi fiktif, karena didalam dokumen permohonan pencairan biaya perbaikan pipa ini tidak dilengkapi data administrasi seperti gambar detail, foto dokumentasi, gambar situasi, faktur pajak dan bukti pembelian dari toko (kwitansi). dan disini dijelaskan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang disebabkan karena masih lemahnya pengawasan internal terhadap kinerja dan disiplin aparatur serta masih minimnya inovasi layanan yang diberikan dan belum berjalan secara memadai (sumber: Medancyber.com 2022)

Adapun hasil dari penelitian terdahulu mengemukakan pengawasan internal tidak mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang belum optimal dapat menurunkan kinerja instansi. Kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya pengawasan internal yang dimiliki pemerintah daerah. Karena sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien, secara optimal akan membawa dampak positif bagi pemerintah daerah, untuk menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Pengawasan internal merupakan proses yang terdapat dalam organisasi dirancang untuk memberikan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan internal pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Karlina et al., 2023).

Sedangkan hasil dari penelitian lain mengemukakan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah maka Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat akan semakin baik (Rahayu & Hendaris, 2022).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi tentang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas juga berkaitan dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada pemegang kekuasaan yang lebih tinggi dalam birokrasi. Dengan ini para manajer publik diharapkan bisa membuat perubahan dari ketaatan pasif menjadi berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Akuntabilitas publik merupakan suatu perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan visi, misi, strategi, maupun pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan. Yang terdiri dari berbagai komponen dan merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, perencanaan strategi, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 transparansi ialah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasar pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Prinsip transparansi menyatakan suatu aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan dapat dengan mudah di akses dan bersifat terbuka kepada para pengguna dan stakeholders yang memerlukan.

Fenomena Akuntabilitas yang terjadi pada pemerintahan Kota Tanjungbalai, dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan OPD Kota Tanjungbalai 3 tahun terakhir bahwa opini yang diberikan berupa Wajar dengan pengecualian (WDP). menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan OPD di Kota Tanjungbalai sangat baik, akan tetapi pelaksanaannya tidak semua OPD di Kota Tanjungbalai mampu menggunakan anggaran yang diberikan secara penuh, berdasarkan kinerja daerah masih belum memenuhi harapan public atau masyarakat di Kota Tanjungbalai. Dimana masih kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Lembaga pemerintah (Sumber: bpk.go.id)

Adapun hasil dari penelitian terdahulu mengemukakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKAD kota Padang. Hal ini mengindikasikan bahwa, dengan adanya pertanggung jawaban kepada publik dan golongan belum menjadi kepentingan utama (Ambarwati, 2021).

Sedangkan hasil dari penelitian lain mengemukakan akuntabilitas berpengaruh positif kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka semakin baik kinerja pemerintah (Jatmiko, 2020)

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi sebagai kunci tata kelola yang lebih baik. Hal ini secara luas dilihat sebagai prasyarat untuk akuntabilitas demokratis dari semua jenis pekerja yang berkuasa (Melasari et al., 2022).

Fenomena di Kota Tanjungbalai masih kurangnya prinsip transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah di Kota Tanjungbalai. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya penerapan prinsip transparansi keuangan yang masih belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yaitu masyarakat ingin mengetahui secara pasti tentang penggunaan dana public yang telah digunakan oleh kantor pemerintah daerah Kota Tanjungbalai (Sumber: LAKIP)

Adapun hasil dari penelitian terdahulu mengemukakan transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. Dengan adanya pengaruh Transparansi terhadap kinerja pemerintah memiliki penjelasan bahwa dengan adanya transparansi yang tinggi, masyarakat tidak lagi curiga dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik (Putri & Riharjo, 2021)

Penerapan berbagai aturan perundang – undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep Pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan

berpihak kepada rakyat. Sehingga dengan adanya kinerja pemerintah keuangan daerah yang akurat dan menciptakan kinerja pemerintahan dengan baik.

Sehubungan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kota Tanjungbalai)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Terdapat rendahnya kinerja dalam 3 tahun belakang terkait capaian kinerja pada strategis sasaran.
2. Ditemukan penyelewengan anggaran di PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, sehingga lemahnya pengawasan internal terhadap kinerja
3. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan karena beberapa OPD tidak mampu menggunakan anggaran yang diberikan secara penuh
4. Kurang terbukanya beberapa informasi dalam penggunaan dana public yang telah digunakan oleh kantor pemerintah daerah Kota Tanjungbalai

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai?

3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan proposal dan untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi, dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya jurusan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.
2. Manfaat Praktis: Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan masukan bagi instansi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah dan juga dapat menjadi referensi dan bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau wawasan yang berhubungan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Definisi Kinerja Pemerintah Daerah

Organisasi pemerintahan adalah struktur atau sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam organisasi pemerintahan, kinerja pemerintah merujuk pada seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik (Muttaqin et al., 2021)

Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga – lembaga public yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada public dalam rangka pemenuhan hak – hak publik (Saragih, 2017)

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota/karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga (Mahsun, 2006).

Ada beberapa definisi tentang kinerja diantaranya adalah; Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Badan Pendidikan dan pelatihan keuangan (BPPK) Depkeu, 2014).

Dalam suatu organisasi pemerintah kinerja seringkali dihubungkan dengan prestasi kerja yang bersifat kolektif. Oleh karena itu dapat di katakan bahwa prestasi kerja organisasi merupakan hasil dari kerja sama antara pegawai yang bersangkutan dengan organisasi dimana pegawai tersebut dapat mencapai prestasi kerja yang diinginkan. Prestasi kerja dicapai manakala kinerja pegawai disandarkan pada standar yang ditetapkan (Swasto, 2011)

Kinerja pemerintah atau organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber – sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. (Edowai et al, 2021).

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi (Chabib & Suropto, 2011).

Menurut Mahsun et al (2015) Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari mulai tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya (Sinambela et al., 2018)

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Wibowo, 2011). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumberdaya dan pembuatan keputusan, dan yang terakhir mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja pemerintah daerah adalah evaluasi dari seberapa baik pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memajukan

pembangunan diwilayah masyarakat.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016) mengidentifikasi tujuan dilakukannya kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Pengukuran kinerja merupakan sarana pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji dan promosi, atau punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.
5. Memotivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi.

6. Menciptakan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2018) manfaat kinerja bagi organisasi pemerintahan yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan-nya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

2.1.1.3 Faktor – Faktor Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi, (2007) menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu:

1. Faktor personal

individu Faktor personal individu meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki setiap individu.

2. Faktor kepemimpinan

Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan lingkungan yang diberikan manajer dan team leader.

3. Faktor tim

faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim

4. Faktor kontekstual

Faktor kontekstual meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

2.1.1.4 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Robbins, (2014) indikator kinerja dapat diukur melalui, yaitu :

1. Kualitas (mutu)

Kinerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan dimana proses hasil kerja mendekati titik kesempurnaan.

2. Kuantitas (jumlah)

Jumlah target yang diharapkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, produksi yang dihasilkan dapat dalam bentuk siklus kegiatan yang terselesaikan.

3. Ketepatan waktu

Pekerjaan tertentu telah diberikan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektivitas

Tingkat penggunaan sumber daya organisasi seperti tenaga, uang, teknologi, dimaksimalkan dengan menaikkan hasil dalam penggunaan sumber daya.

5. Efisiensi Mengukur derajat kesesuaian penghasilan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.

Adapun indikator kinerja pemerintah daerah yang penulis gunakan yaitu indikator menurut Halim (2016) antara lain yaitu ;

1. Ekonomi

Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiaya aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran maka terjadi pemborosan.

2. Efisiensi

Proses kegiatan operasional dapat dikatak efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

3. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Pengawasan Internal

2.1.2.1 Definisi Pengawasan Internal

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim & Iqbal, 2012). Pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar segala kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan (Hanum & Farhan, 2019)

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Kadarisman, 2013).

Pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal (Halim & Kusufi, 2018). Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan (Handoko, 2014). Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan internal harus

dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing (Sururama & Amalia, 2020)

Pengawasan internal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi atau satuan masing – masing (Nawawi, 2002). Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan inspektorat termasuk jenis pengawasan internal. BPKP mengawasi Kementerian / Lembaga negara. Terhadap Kementerian/Lembaga negara, posisi BPKP relatif independen. Akan tetapi BPKP termasuk Lembaga yang merupakan bagian internal dari pemerintahan. Begitu juga inspektorat wilayah, Lembaga ini relatif independen terhadap SKPD yang diawasi. Namun inspektorat wilayah merupakan bagian internal dari pemerintah daerah (Siregar, 2017).

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan pengawasan internal adalah proses melibatkan evaluasi, pemantauan, dan pengendalian yang dilakukan oleh unit – unit atau mekanisme internal pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan dan operasi pemerintah berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, standar, dan prosedur yang ditetapkan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Pengawasan Internal

Menurut Mulyadi (2001) mengatakan bahwa adanya tujuan sistem pengawasan internal menurut definisi tersebut adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Mulyadi (2001) tujuan pengawasan internal dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pengawasan Intern Akuntansi (Intern Accounting Control) Merupakan bagian dari sistem pengawasan intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengawasan Intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam Perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
2. Pengawasan Internal administrasi (intern Administrative control) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Mukarom & Wijaya (2015) Tujuan Pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintah adalah:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama.
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.

Menurut Feriyanto & Triana (2015) tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka.

2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja.
3. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang.
4. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik.
5. Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif.
6. Untuk memastikan kualitas pekerjaan.

Menurut Siagian (2003) manfaat pengawasan adalah:

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalnya faktor – faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Mengetahui Langkah – Langkah apa saja yang segera di ambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Dapat melakukan Tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak harus berlanjut.

2.1.2.3 Indikator Pengawasan Internal

Menurut Handoko (2016) Indikator Pengawasan internal adalah :

1. Penetapan standar pelaksanaan
Menetapkan standar pelaksanaan yaitu menetapkan suatu satuan pengukuran yang akan digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil–hasil suatu pekerjaan.

2. Pengukuran hasil kerja

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja, yaitu melalui pengamatan, laporan lisan dan tertulis, inspeksi atau dengan pengambilan sampel.

3. Penilaian kinerja

Merupakan proses untuk menentukan tingkat perbedaan antara pelaksanaan kerja (hasil) yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

4. Tindakan koreksi

Tindakan perbaikan atau koreksi dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang harus segera diperbaiki. Melalui tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, diharapkan hasil kerja sesuai dengan rencana.

Menurut (Handoko, 2016) indikator pengawasan internal adalah:

1. Mengamati dengan maksud untuk merasakan kegiatan yang dilakukan manusia cerdas pada proses atau objek, dan memahami pengetahuan tentang fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide yang diketahui
2. Inspeksi berkala dan langsung adalah salah satu alat kontrol administratif klasik, namun sangat relevan dan sering digunakan untuk mengidentifikasi masalah lokasi dan menilai tingkat risiko yang meningkat.
3. Pelaporan Lisan dan Tertulis Bentuk dimana bawahan menyampaikan berita, informasi, pemberitahuan atau pertanggungjawaban kepada atasannya secara lisan

dan tertulis, sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara bawahan dengan atasan. Evaluasi pelaksanaan dengan demikian merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menentukan kualitas (nilai dan kepentingan) sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam proses pengambilan Keputusan.

Adapun indikator pengawasan internal yang penulis gunakan yaitu indikator menurut (Hasibuan, 2019) antara lain yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaannya.

2. Pengawasan Korektif

Adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, reabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui Seperangkat prosedur yang sangat

spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (LAN & BPKP, 2000)

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk menncapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggung jawaban tersebut. (Edowai et al, 2021).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2018).

Setiap akuntan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin, akuntabilitas yang dimiliki seorang auditor dapat

meningkatkan proses kognitif auditor dalam dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kualitas audit (Nainggolan & Abdullah, 2016)

Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban individu atau kelompok terhadap unit organisasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Adisasmita, 2011).

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya (Kusumastuti et al, 2014). Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (principal) (Mahmudi, 2016). Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Rasul, 2002)

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga – lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi) (Turner & Hulme, 1997)

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan (Sembiring, 2022)

Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam Masyarakat (Dwiyanto, 2006)

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan akuntabilitas adalah konsep yang mengacu pada kewajiban seseorang atau suatu entitas untuk bertanggungjawab atas Tindakan, Keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang diberikan kepadanya.

2.1.3.2 Tujuan Dan Manfaat Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang harus terjadi. Apabila terjadi suatu kendala, atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus segera dikoreksi. Menurut Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu apa, mengapa, siapa, yang mana, ke mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban dilaksanakan (Ghartery, 2004)

Menurut Waluyo (2007) manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi yaitu:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi,
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsivitas organisasi
3. Mendorong partisipasi masyarakat

4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja,
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek.

Menurut Mardiasmo (2009) indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Proses (Process accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program (program accountability).

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan - kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Definisi Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi

yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka public dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi / suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya dibeberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah (Edowai et al, 2021).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan – kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat (Didjaja, 2003). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2013).

Menurut Mursyidi (2015) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Konsep transparansi adalah nilai utama dari sistem pemerintahan, konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakikatnya ada kaitan dengan percepatan dan pengaruh organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi

masyarakat. Ini merupakan tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat. Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. (Edowai et al., 2021).

Transparansi menunjuk suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi tinggi (Dwiyanto, 2006)

Transparansi atau (*transparency*) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, arti transparansi keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan good governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan (Tahir, 2011)

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat (Lalolo Krina, 2003)

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya (Agoes & Ardana, 2009). Transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengizinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik/pemerintah (Subhan, 2017)

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan transparansi adalah prinsip dimana pemerintah memberikan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi, Keputusan, dan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan 34

aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah (Edowai et al., 2021).

Menurut Adrianto (2017) Beberapa manfaat penting adanya transparansi terdiri dari:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

2.1.4.3 Indikator Transparansi

Menurut Kristianten (2006) indikator transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Menurut Mardiasmo (2018) ada 3 indikator transparansi yaitu:

1. Informativeness (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Openness (Keterbukaan), yaitu keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
3. Disclosure (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Menurut Ula (2018) ada 4 indikator transparansi. Berikut indikator transparansi yang sekaligus menjadi fokus utama penulis pada penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi Publik oleh pemerintah
2. Hak Masyarakat terhadap akses informasi
3. Ketepatan dalam pelaporan
4. Kualitas informasi yang disampaikan

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| 1 | Jatmiko, Bambang (2020) | Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | hasil dari penelitian ini; Pengawasan Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah; Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah; dan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. |
| 2 | Ranti Melasari, Rosliana, Peni Silvionita (2022) | Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Opd Kabupaten Indragiri Hilir | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah serta transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. |
| 3 | Rahayu, Intan, and R. Budi Hendaris (2022) | Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat) | Hasil dari penelitian menunjukkan (1) Good Government Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, (2) Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dan (3) Good Government Governance dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. |
| 4 | Putri, Oktavia Berliana, and Ikhsan Budi Riharjo (2021) | Pengaruh Transparansi, Budaya Organisasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah | hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan (2) Variabel Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. (3) Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah pada SKPD Kabupaten Lamongan. |
| 5 | Dea Rahma Novitasari, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2020) | Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Semarang. Pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Semarang |

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Pengaruh Langsung Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan internal merupakan penilaian yang dibentuk dalam organisasi yang melaksanakan kegiatannya untuk organisasi tersebut. Pengawasan internal juga membantu anggota organisasi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan menyediakan mereka berbagai penilaian, nasihat, analisis, rekomendasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa (Rozi et al., 2021)

Pengawasan internal merupakan aparat pengawas yang melaksanakan pengawasan di lingkungan internal suatu instansi pemerintah (Rahayu & Hendaris, 2022)

Kinerja merupakan suatu hasil atau kondisi yang perlu diketahui dan dilaporkan kepada pihak tertentu guna mengetahui melihat pencapai hasil dari suatu instansi dengan tujuan yang diemban oleh suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan operasional tersebut (Ambarwati, 2021)

Penelitian-penelitian terdahulu juga banyak membahas bagaimana hubungan pengawasan internal dengan kinerja pemerintah daerah. Dari kesimpulan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Jatmiko, 2020; Novitasari & Prabowo, 2020; Rahayu & Hendaris, 2022).

Kesimpulan dari peneliti terdahulu menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Langsung Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajiban yang akan dipertanggung jawabkan kepada lingkungan (D. P. Saragih & Alpi, 2023)

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kapasitas organisasi untuk mengenali, menerima, dan bertanggung jawab atas perannya dalam manajemen bisnis. Akuntabilitas (Nurazizza & Sudrajat, 2023)

Akuntabilitas manajerial menuntut lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Setiap proses dalam organisasi harus dipertanggungjawabkan untuk menghindari ketidakefektifan organisasi. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang seminimal mungkin (Jatmiko, 2020)

Penelitian-penelitian terdahulu banyak membahas tentang bagaimana hubungan akuntabilitas dengan kinerja pemerintah daerah. Dari kesimpulan penelitian terdahulu maka dapat dilihat ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik akan meningkatkan kinerja pemerintah (Jatmiko, 2020; Melasari et al., 2022; Putri & Riharjo, 2021).

Kesimpulan dari peneliti terdahulu menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah

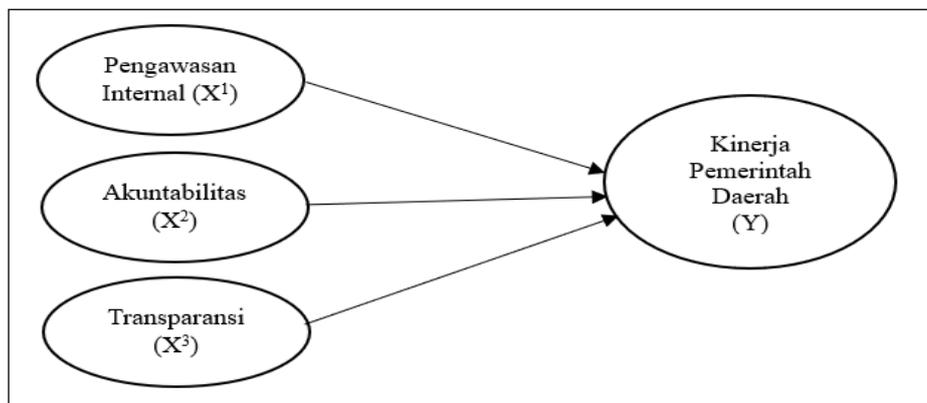
2.2.3 Pengaruh Langsung Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh public (Putra et al., 2023)

Penelitian-penelitian terdahulu banyak membahas tentang bagaimana hubungan transparansi dengan kinerja pemerintah daerah. Dari kesimpulan penelitian terdahulu maka dapat dilihat ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah (Jatmiko, 2020; Melasari et al., 2022; Putri & Riharjo, 2021).

Kesimpulan dari peneliti terdahulu menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel Transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.



Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan dari teori diatas yang hasilnya semua berpengaruh, maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengawasan Internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah organisasi perangkat daerah kota Tanjungbalai
3. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu (Sugiyono, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2020)

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah fitur yang dapat diamati berdasarkan fitur yang dapat didefinisikan atau dengan kata lain sebuah konsep yang diubah dalam bentuk yang konstruktif dan menggunakan kata – kata yang menggambarkan perilaku atau fenomena yang dapat diuji dan ditentukan sebagai benar (Hantono, 2020)

Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan Variabel dependen yakni Kinerja pemerintah daerah sebagai (Y) dan variabel independen, yaitu pengawasan internal sebagai (X₁), Akuntabilitas sebagai (X₂), dan Transparansi sebagai (X₃).

Tabel 3. 1. Operasional Variabel Penelitian

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala |
|---------------------------------------|---|---|--------------|
| Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | kinerja pemerintah daerah adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi (Chabib & Suripto, 2011, hal. 3). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas (Halim, 2016) | Ordinal |
| Pengawasan Internal (X ₁) | Pengawasan Intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan intern harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing (Sururama & Amalia, 2020, hal 83) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar 2. Pengukuran kerja 3. Penilaian Kinerja 4. Tindakan koreksi (Hasibuan, 2019) | Ordinal |
| Akuntabilitas (X ₂) | akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya (Kusumastuti et al, 2014, hal 2). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas manajerial 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas finansial (Mardiasmo, 2009) | Ordinal |
| Transparansi (X ₃) | transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2013, hal. 133). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Ula, 2018) | Ordinal |

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat dilaksanakan penelitian yaitu di 34 kantor dari seluruh perangkat instansi pada organisasi pemerintahan daerah Kota Tanjungbalai.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2023 dan direncanakan selesai pada bulan Agustus 2024.

Tabel 3. 2. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Desember (2023) | | | | Januari (2024) | | | | Februari (2024) | | | | Maret (2024) | | | | April (2024) | | | | Mei (2024) | | | | Juni (2024) | | | | Juli (2024) | | | | Agustus (2024) | | | |
|----|---|-----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|---|---|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|---|----------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penelitian Pendahuluan (pra-riset) | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan proposal | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembimbingan proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penyempurnaan proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengumpulan data | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengolahan dan analisis data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan skripsi (laporan penelitian) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 9 | Pembimbingan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 10 | Sidang meja hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | |
|----|---|
| 27 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 28 | Kecamatan Sei Tualang Raso |
| 29 | Kecamatan Teluk Nibung |
| 30 | Dinas Perikanan |
| 31 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 32 | Dinas Ketenagakerjaan |
| 33 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 34 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |

Sumber : OPD Kota Tanjungbalai, diolah (2024)

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah model probability sampling atau random sampling yaitu accidental sampling yaitu penyebaran kuesioner ke seluruh populasi dan melihat dari 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merespon kuesioner tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020, hal. 194). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner adalah Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2020). Dengan demikian sampel dalam penelitian ini di berikan kepada Bendahara dan Sekretaris Kepala Dinas.

Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pertanyaan mempunyai 5 opsi yaitu:

Tabel 3. 4. Skala Likert

| Pertanyaan | Bobot |
|---------------|-------|
| - Sangat Baik | 5 |
| - Baik | 4 |
| - Cukup Baik | 3 |
| - Kurang Baik | 2 |
| - Tidak Baik | 1 |

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2020).

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya dengan ini dilakukan pengujian uji validitas dan realibilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Artinya suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsinya. Atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah (Hantono, 2020).

Tabel 3. 5 Uji Validitas

| Item Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan | |
|-------------------------------|----------|---------|------------|-------|
| Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | Y1 | 0.791 | 0.3388 | Valid |
| | Y2 | 0.785 | 0.3388 | Valid |
| | Y3 | 0.845 | 0.3388 | Valid |
| | Y4 | 0.812 | 0.3388 | Valid |
| | Y5 | 0.740 | 0.3388 | Valid |
| | Y6 | 0.746 | 0.3388 | Valid |
| Pengawasan Internal (X1) | X1.1 | 0.813 | 0.3388 | Valid |

| | | | | |
|--------------------|------|-------|--------|-------|
| | X1.2 | 0.867 | 0.3388 | Valid |
| | X1.3 | 0.537 | 0.3388 | Valid |
| | X1.4 | 0.820 | 0.3388 | Valid |
| | X1.5 | 0.880 | 0.3388 | Valid |
| | X1.6 | 0.929 | 0.3388 | Valid |
| Akuntabilitas (X2) | X2.1 | 0.787 | 0.3388 | Valid |
| | X2.2 | 0.788 | 0.3388 | Valid |
| | X2.3 | 0.898 | 0.3388 | Valid |
| | X2.4 | 0.903 | 0.3388 | Valid |
| | X2.5 | 0.856 | 0.3388 | Valid |
| | X2.6 | 0.800 | 0.3388 | Valid |
| | X2.7 | 0.684 | 0.3388 | Valid |
| | X2.8 | 0.720 | 0.3388 | Valid |
| Transparansi (X3) | X3.1 | 0.701 | 0.3388 | Valid |
| | X3.2 | 0.863 | 0.3388 | Valid |
| | X3.3 | 0.722 | 0.3388 | Valid |
| | X3.4 | 0.676 | 0.3388 | Valid |
| | X3.5 | 0.848 | 0.3388 | Valid |
| | X3.6 | 0.850 | 0.3388 | Valid |

1. Nilai r hitung untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah lebih besar dari nilai r tabel
2. yaitu 0.3388 maka dapat dikatakan semua indikator pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah dinyatakan valid.
3. Nilai r hitung untuk variabel Pengawasan Internal lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0.3388 maka dapat dikatakan semua indikator pada variabel Pengawasan Internal dinyatakan valid.
4. Nilai r hitung untuk variabel Akuntabilitas lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0.3388 maka dapat dikatakan semua indikator pada variabel Akuntabilitas dinyatakan valid.
5. Nilai r hitung untuk variabel Transparansi lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0.3388 maka dapat dikatakan semua indikator pada variabel Transparansi dinyatakan valid.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrument yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi dilapangan sebagai alat pengumpulan data. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu (Hantono, 2020). Terdapat kriteria pengujian kategori reliabel untuk menetapkan item – item pertanyaan (Juliandi et al., 2014)

Berikut kriteria pengujian nya sebagai berikut:

1. Jika nilai koefisien realibilitas (cronbach's Alpha) > 0.6 maka instrument dinyatakan reliabel atau terpercaya.
2. Jika nilai koefisien realibilitas (Cronbach's Alpha) > 0.6 maka instrument dinyatakan tidak reliabel atau tidak terpercaya.

Tabel 3. 6 Uji Realibilitas

| No | Variabel | Nilai Alpha | Keterangan |
|----|---------------------------|-------------|------------|
| 1 | Kinerja Pemerintah Daerah | 0.877 | Reliabel |
| 2 | Pengawasan Internal | 0.899 | Reliabel |
| 3 | Akuntabilitas | 0.922 | Reliabel |
| 4 | Transparansi | 0.866 | Reliabel |

1. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai realibilitas sebesar $0.877 > 0.6$ maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah adalah reliabel.
2. Variabel Pengawasan Internal memiliki nilai realibilitas sebesar $0.899 > 0.6$ maka variabel Pengawasan Internal adalah reliabel.
3. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai realibilitas sebesar $0.922 > 0.6$ maka variabel Akuntabilitas adalah reliabel.
4. Variabel Transparansi memiliki nilai realibilitas sebesar $0.866 > 0.6$ maka variabel Transparansi adalah reliabel.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) dengan menggunakan Smart – PLS 4. Model Persamaan Struktural atau SEM (Structural Equation Modeling) adalah analisis statistik untuk penelitian yang membutuhkan analisis secara serempak atau sekaligus seluruh variabel – variabel (Jualiandi, 2018)

Berikut adalah model atau Langkah – Langkah untuk menganalisis data menggunakan Smart – PLS 4 yaitu:

3.6.1 Analisis Model Pengukuran (Outer Models)

Model pengukuran (outer models) adalah suatu model yang mendeskripsikan hubungan antar variabel laten (konstruk) dengan indikator nya (Jualiandi, 2018)

Berikut Indikator – indikator dari analisis model pengukuran (Outer Models) yaitu:

1. validitas konvergen (convergent validity);
2. validitas diskriminan (discriminant validity)
3. realibilitas dan validitas konstruk (construct reliability and validity);

3.6.1.1. Validitas Konvergent (Convergent Validity)

Validitas konvergen adalah sejauh mana ukuran berkolerasi positif dengan ukuran alternatif dari konstruk yang sama. Untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak adalah dilihat dari nilai outer loading. Jika nilai outer loading lebih besar dari 0,4 maka suatu indikator adalah valid (Jualiandi, 2018)

3.6.1.2. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Validitas diskriminan adalah bertujuan untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dengan nilai yang lain. Nilai cross loading

masing – masing konstruk di evaluasi untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada konstruk lainnya. Nilai cross loading yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali & Latan, 2015)

3.6.1.3. Validitas dan Reliabilitas Konstruk (Construct Reliability and Validity)

Validitas dan realibilitas konstruk adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menilai kehandalan suatu konstruk (Jualiandi, 2018). Pengujian validitas dan realibilitas konstruk menggunakan nilai composite realibilty memiliki kriteria nilai realibilitas sebesar > 0.600 dapat dikatakan reliabel. (Hair et al., 2017)

3.6.2 Analisis Model Struktural (Inner Models)

Analisis model struktural (inner model) adalah suatu model yang menjelaskan suatu hubungan antar variabel konstruk. Teori atau asumsi – asumsi berdasarkan hubungan variabel antar konstruk (Jualiandi, 2018)

Analisis model struktural (inner model), yakni

1. Kolinearitas (Colinierity/Variance Inflaction Factor/VIF)
2. Koefisien determinasi (r-square);
3. f-square; dan
4. Uji Hipotesis

3.6.2.1 Kolinearitas (Colinierity/Variance Inflaction Factor/VIF)

Pengujian kolinearitas (*Colinierity / Variance Inflaction Factor / VIF*) adalah untuk membuktikan suatu korelasi yang menyatakan kuat atau tidak nya antar variabel konstruk. Apabila terdapat nilai VIF > 5.00 yang artinya terjadi masalah kolinearitas, dan

apabila terdapat nilai VIF lebih kecil dari < 5.00 yang artinya tidak terjadi masalah kolinearitas (Hair et al., 2017)

3.6.2.2 R-Square

R-Square adalah mengukur keakuratan prediksi suatu nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Yang berguna untuk mengetahui baik atau buruknya suatu model (Jualiandi, 2018)

3.6.2.3 F-Square

F-Square adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai dampak suatu relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran F^2 (F-square) berdampak pada perubahan R^2 yang berarti perubahan nilai R^2 terjadi pada saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substantif pada konstruk endogen (Jualiandi, 2018)

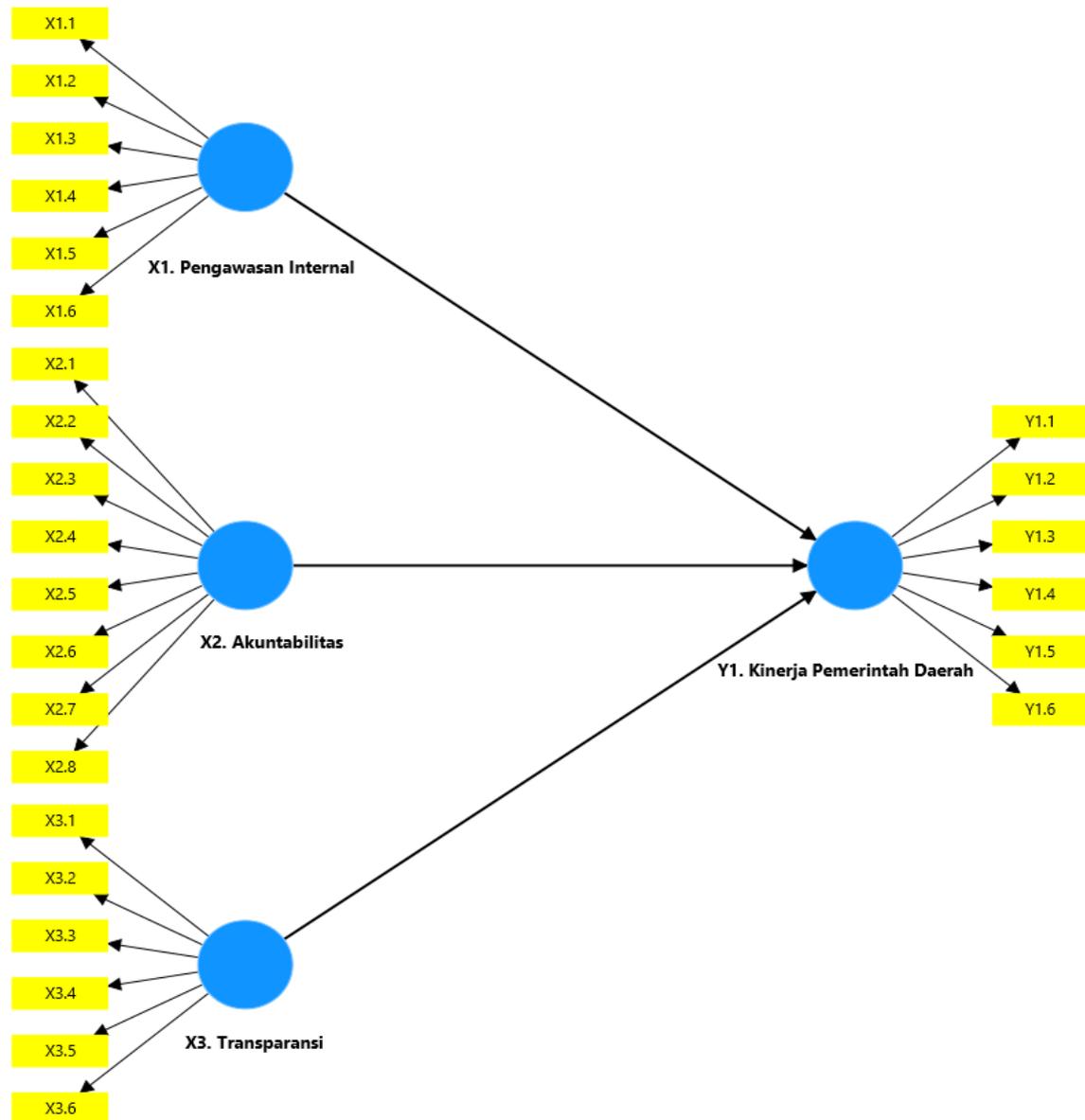
3.6.2.4 Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Pengaruh langsung (Direct Effect) adalah suatu pengujian hipotesis pengaruh langsung variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Jualiandi, 2018)

3.6.3 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

Berikut gambar model struktural PLS :



Gambar 3. 1. Model Struktural PLS

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data kuesioner dari responden yang menjelaskan pernyataan dari kondisi responden. Data ini digunakan sebagai bentuk informasi untuk mengetahui hasil dari penelitian. Peneliti mengelola data dalam bentuk data yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel kinerja pemerintah daerah (Y), 6 pernyataan untuk pengawasan internal (X1), 8 pernyataan untuk variabel akuntabilitas (X2), 6 pernyataan untuk variabel transparansi. Peneliti menyebarkan kuesioner ini dengan memberikan kepada 58 responden yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungbalai.

4.1.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Adapun kuesioner yang disebarkan oleh peneliti adalah sebanyak 68 kuesioner ke semua Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian kuesioner yang disebarkan masing – masing 2 kuesioner ke setiap Organisasi Perangkat Daerah, dan yang kembali atau di isi sejumlah kuesioner yang di sebar yaitu sebanyak 58 kuesioner.

Tabel 4. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

| No | Keterangan | Opd | % |
|----|------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Kuesioner yang di bagikan | 68 | 100% |
| 2 | Kuesioner yang tidak Kembali | (10) | 15% |
| 2 | Kuesioner yang di kembalikan | 58 | 85% |

Sumber: Data Diolah 2024

4.1.2. Identitas Responden

Peneliti telah mengumpulkan data identitas responden, seperti umur, Jenis kelamin, Pendidikan terakhir, dan lama kerja dengan melakukan penyebaran kuesioner ke 34 OPD. Adapun kuesioner yang terisi berjumlah 58 (lima puluh delapan) data responden. Adapun rincian data identitas responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu:

4.1.3. Identitas Berdasarkan Umur

Tabel 4. 2. Umur Responden

| No | Umur | Jumlah | Persentase |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1 | Kurang 25 tahun | 1 | 2% |
| 2 | 25 – 30 tahun | 6 | 10% |
| 3 | 31 – 40 tahun | 17 | 29% |
| 4 | 41 – 50 Tahun | 25 | 43% |
| 5 | Lebih 50 tahun | 9 | 16% |
| Total | | 58 | 100% |

Sumber: Data Diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa jumlah persentase identitas responden yaitu: Identitas umur terdiri dari yang berumur kurang 25 tahun sebanyak 1 orang (2%), berumur 25 – 30 tahun sebanyak 6 orang (10%), berumur 31 – 40 tahun sebanyak 17 orang (29%). Berumur 41 – 50 tahun sebanyak 25 orang (43%). Dan lebih 50 tahun sebanyak 9 orang (16%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah yang berumur 41 – 50 tahun persentasenya (43%) pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai.

4.1.4. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | Laki – Laki | 21 | 36% |
| 2 | Perempuan | 37 | 64% |
| Total | | 58 | 100% |

Sumber: Data Diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa jumlah persentase identitas responden yaitu: Jenis kelamin terdiri dari jenis kelamin laki – laki sebanyak 21 orang (36%) dan jenis kelamin Perempuan sebanyak 37 orang (64%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah jenis kelamin Perempuan persentasenya (64%) pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai.

4.1.5. Identitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 4. Pendidikan Terakhir Responden

| No | Pendidikan Terakhir | Frekuensi | Persentase |
|--------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | SMA | 4 | 7% |
| 2 | S1 | 37 | 64% |
| 3 | S2 | 17 | 29% |
| Total | | 58 | 100% |

Sumber: Data Diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa jumlah persentase identitas responden yaitu: Pendidikan terakhir terdiri dari Pendidikan SMA sebanyak 4 orang (7%), Pendidikan S1 sebanyak 37 orang (64%), S2 sebanyak 17 orang (29%), Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah Pendidikan S1 persentasenya (64%) pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai.

4.1.6. Identitas Berdasarkan Lama Kerja

Tabel 4. 5. Lama Kerja Responden

| No | Umur | Frekuensi | Persentase |
|--------------|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Kurang 1 Tahun | 2 | 4% |
| 2 | 1 – 5 Tahun | 6 | 10% |
| 3 | 6 – 10 Tahun | 14 | 24% |
| 4 | 11 – 20 Tahun | 22 | 38% |
| 5 | Lebih 20 Tahun | 14 | 24% |
| Total | | 58 | 100% |

Sumber: Data Diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa jumlah persentase identitas responden yaitu: lama kerja terdiri dari kurang 1 tahun sebanyak 2 orang (4%), 1 – 5 tahun sebanyak 6 orang (10%), 6 – 10 tahun sebanyak 14 orang (24%),

11 – 20 tahun sebanyak 22 orang (38%), lebih 20 tahun sebanyak 14 orang (24%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah lama kerja 11 – 20 tahun dengan masing – masing persentase nya (38%) pada organisasi perangkat daerah Kota Tanjungbalai.

4.1.7. Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu kinerja pemerintah daerah (Y), pengawasan internal (X1), akuntabilitas (X2), transparansi (X3). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden. prinsip kategori yang dilakukan berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori (Sugiyono, 2019)

prinsip kategori berdasarkan rumus dibawah ini yaitu:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Sehingga kategori skala interval nya dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Skala Interval

| Interval | Kategori |
|-------------|-------------------|
| 1,00 – 1,80 | Sangat Tidak Baik |
| 1,81 – 2,60 | Tidak Baik |
| 2,61 – 3,40 | Kurang Baik |
| 3,41 – 4,20 | Baik |
| 4,21 – 5,00 | Sangat Baik |

Setelah di tentukan kategori skala interval, maka dapat di deskripsikan atas tanggapan responden tersebut pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

4.1.8. Deskripsi Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tanjungbalai telah di rekapitulasi dari pengumpulan data kuesioner. Berikut hasil rekapitulasi deskripsi variabel kinerja pemerintah daerah yaitu:

Tabel 4. 7. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

| No | Pernyataan | | SB | B | CB | KB | TB | Total Skor | Rata rata Skor | Kategori |
|----|--|------|-------|-------|----|----|----|------------|----------------|-------------|
| 1 | Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan kinerja pemerintah daerah. | F | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 51,72 | 48,28 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 150 | 112 | 0 | 0 | 0 | 262 | 4,51 | |
| 2 | Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan kinerja pemerintah daerah. | F | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 46,55 | 53,45 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 135 | 124 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4,46 | |
| 3 | Pada instansi tempat Saya bekerja, pemerintah daerah melakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan | F | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 60,34 | 39,66 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 175 | 92 | 0 | 0 | 0 | 267 | 4,60 | |
| 4 | Pada instansi tempat Saya bekerja, telah | F | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |

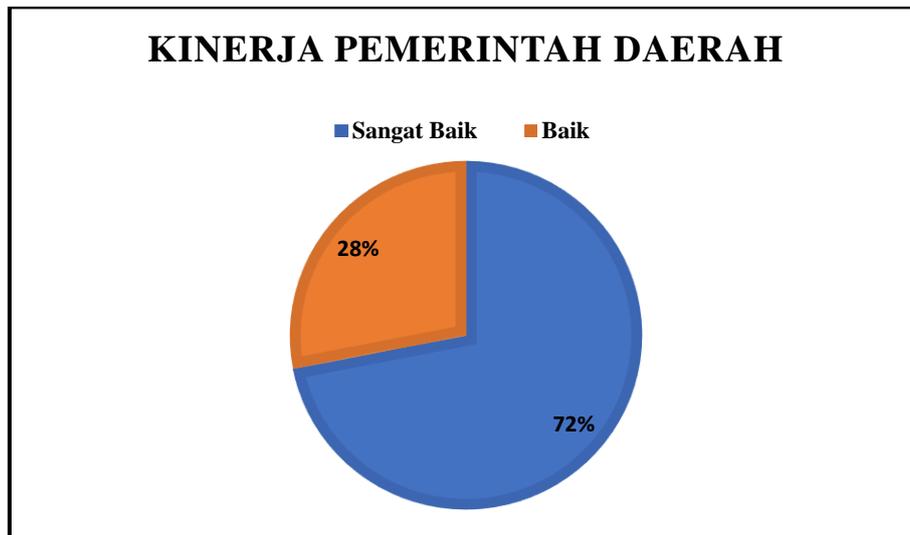
| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|-------|-------|---|---|---|-----|-------------|-------------|
| | dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. | % | 51,72 | 48,28 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 150 | 112 | 0 | 0 | 0 | 262 | 4,51 | |
| 5 | Pada instansi tempat Saya bekerja, Pemerintah daerah menggunakan LAKIP sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan | F | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 55,17 | 44,82 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 160 | 104 | 0 | 0 | 0 | 264 | 4,55 | |
| 6 | Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja pemerintah daerah dengan program dan kebijakan. | F | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 41,38 | 58,62 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 120 | 136 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4,41 | |
| Total Rata – Rata Skor | | | | | | | | | 4,50 | |

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden mengenai pernyataan dari variabel Kinerja Pemerintah Daerah, yaitu responden lebih dominan memilih kelompok jawaban sangat baik, pada item pernyataan “Pada instansi tempat Saya bekerja, pemerintah daerah melakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan” sebanyak 35 dengan persentase rata – rata skor sebesar 60,34 %. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tanjungbalai sudah menerapkan indikator Kinerja Pemerintah Daerah

dengan sangat baik. Kinerja Pemerintah Daerah memiliki total rata – rata skor jawaban responden sebesar 4,50.

Adapun data tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Diagram Kinerja Pemerintah Daerah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya tanggapan responden pada item pernyataan di variabel Kinerja Pemerintah Daerah berada dalam kategori sangat baik dengan jumlah persentase sebanyak 72%.

4.1.9. Deskripsi Variabel Pengawasan internal

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tanjungbalai telah di rekapitulasi dari pengumpulan data kuesioner. Berikut hasil rekapitulasi deskripsi variabel pengawasan internal yaitu:

Tabel 4. 8. Variabel Pengawasan Internal

| No | Pernyataan | | SB | B | CB | KB | TB | Total Skor | Rata rata Skor | Keterangan |
|----|--|------|-------|-------|-------|----|----|------------|----------------|-------------|
| 1 | Standard operating procedure (SOP) sebaiknya dibuatkan untuk penyelenggaraan | F | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 44,83 | 44,83 | 10,34 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 130 | 104 | 18 | 0 | 0 | 252 | 4,34 | |

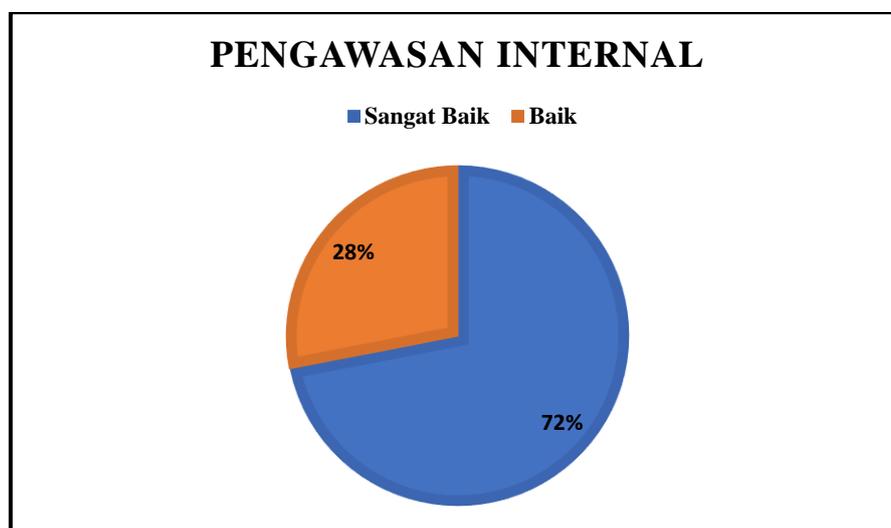
| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|-------|-------|------|---|---|-----|-------------|-------------|
| | kegiatan pengelola anggaran | | | | | | | | | |
| 2 | Suatu kegiatan atau transaksi sebaiknya dilakukan pemisahan wewenang secara tepat | F | 25 | 29 | 4 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 43,10 | 50 | 6,90 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 125 | 116 | 12 | 0 | 0 | 253 | 4,36 | |
| 3 | Setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh bukti transaksi valid dan sah | F | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 81,03 | 18,97 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 235 | 44 | 0 | 0 | 0 | 279 | 4,81 | |
| 4 | Sebaiknya terdapat Tindakan disiplin yang tepat apabila terjadi penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku | F | 23 | 34 | 1 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 39,66 | 58,62 | 1,72 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 115 | 136 | 3 | 0 | 0 | 254 | 4,35 | |
| 5 | Sebaiknya terdapat pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses | F | 14 | 41 | 3 | 0 | 0 | 58 | | Baik |
| | | % | 24,14 | 70,69 | 5,17 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 70 | 146 | 9 | 0 | 0 | 225 | 3,87 | |
| 6 | Sebaiknya terdapat Langkah – Langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terbentuknya operasi komputer. | F | 23 | 30 | 5 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 39,66 | 51,72 | 8,62 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 115 | 120 | 25 | 0 | 0 | 260 | 4,48 | |
| Total Rata – Rata Skor | | | | | | | | | 4,36 | |

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden mengenai pernyataan dari variabel pengawasan internal yaitu responden lebih dominan memilih kelompok jawaban sangat baik, pada item pernyataan “setiap transaksi yang

terjadi harus didukung oleh bukti transaksi valid dan sah” sebanyak 47 dengan persentase rata – rata skor sebesar 81,03 %. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tanjungbalai sudah menerapkan indikator Pengawasan Internal dengan sangat baik. Pengawasan Internal memiliki total rata - rata skor jawaban responden sebesar 4,36.

Adapun data tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Diagram Pengawasan Internal

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya tanggapan responden pada item pernyataan di variabel Pengawasan Internal berada dalam kategori sangat baik dengan jumlah persentase sebanyak 72%.

4.1.10. Deskripsi Variabel Akuntabilitas

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tanjungbalai telah di rekapitulasi dari pengumpulan data kuesioner. Berikut hasil rekapitulasi deskripsi variabel Akuntabilitas yaitu:

Tabel 4. 9. Variabel Akuntabilitas

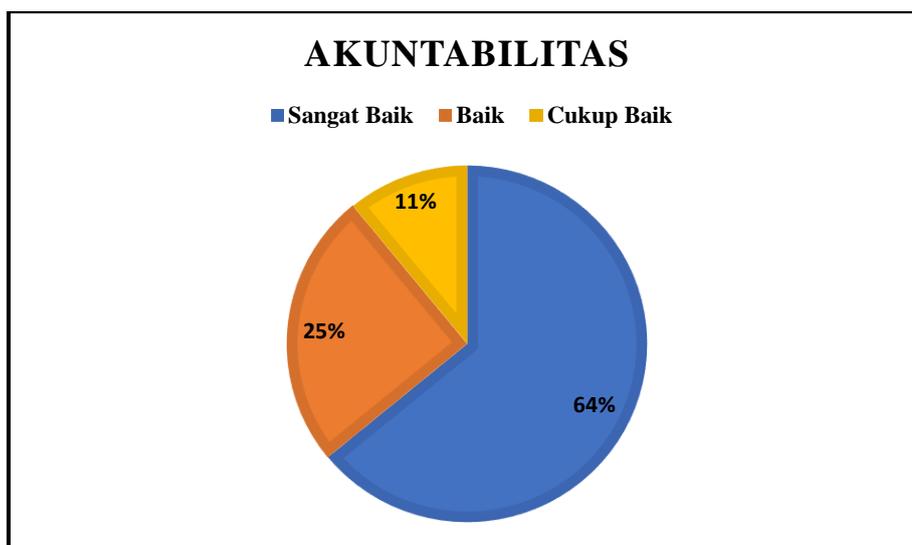
| No | Pernyataan | | SB | B | CB | KB | TB | Total Skor | Rata rata Skor | Kategori |
|----|---|------|-------|-------|------|----|----|------------|----------------|-------------|
| 1 | Adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang di isyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana publik | F | 31 | 24 | 3 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 53,45 | 41,38 | 5,17 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 155 | 96 | 9 | 0 | 0 | 260 | 4,48 | |
| 2 | Tidak adanya penyalahgunaan jabatan (abuse of power) selama periode pemerintahan daerah | F | 30 | 26 | 2 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 51,72 | 44,83 | 3,45 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 150 | 104 | 6 | 0 | 0 | 260 | 4,48 | |
| 3 | Prosedur sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik | F | 24 | 29 | 5 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 41,38 | 50 | 8,62 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 120 | 116 | 15 | 0 | 0 | 251 | 4,32 | |
| 4 | Prosedur administrasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik | F | 25 | 28 | 5 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 43,10 | 48,28 | 8,62 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 125 | 112 | 15 | 0 | 0 | 252 | 4,34 | |
| 5 | Tujuan yang semula ditetapkan tercapai dengan baik | F | 17 | 37 | 4 | 0 | 0 | 58 | | Baik |
| | | % | 29,31 | 63,79 | 6,90 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 85 | 148 | 12 | 0 | 0 | 245 | 4,22 | |
| 6 | Adanya pertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal | F | 14 | 40 | 4 | 0 | 0 | 58 | | Baik |
| | | % | 24,14 | 68,96 | 6,90 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 70 | 160 | 12 | 0 | 0 | 242 | 4,17 | |
| 7 | Laporan keuangan daerah dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi | F | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 39,66 | 60,34 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 115 | 140 | 0 | 0 | 0 | 255 | 4,39 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|-------|-------|---|---|---|-----|-------------|------|
| | (vertical) dan kepada Masyarakat luas (horizontal) | | | | | | | | | |
| 8 | Adanya pertanggungjawaban atas kebijakan – kebijakan yang diambil terhadap Masyarakat luas | F | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58 | Sangat Baik | |
| | | % | 32,79 | 67,24 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 95 | 156 | 0 | 0 | 0 | 251 | | 4,32 |
| Total Rata – Rata Skor | | | | | | | | | 4,34 | |

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden mengenai pernyataan dari variabel Akuntabilitas yaitu responden lebih dominan memilih kelompok jawaban sangat baik, pada item pernyataan “Adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang di isyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana publik” sebanyak 31 dengan persentase rata – rata skor sebesar 53,45 %. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tanjungbalai sudah menerapkan indikator Akuntabilitas dengan sangat baik. Akuntabilitas memiliki nilai rata – rata skor jawaban responden sebesar 4,34.

Adapun data tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar 4. 3 Diagram Akuntabilitas

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya tanggapan responden pada item pernyataan di variabel akuntabilitas berada dalam kategori sangat baik dengan jumlah persentase sebanyak 64%.

4.1.11. Deskripsi Variabel Transparansi

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tanjungbalai telah di rekapitulasi dari pengumpulan data kuesioner. Berikut hasil rekapitulasi deskripsi variabel Transparansi yaitu:

Tabel 4. 10. Variabel Transparansi

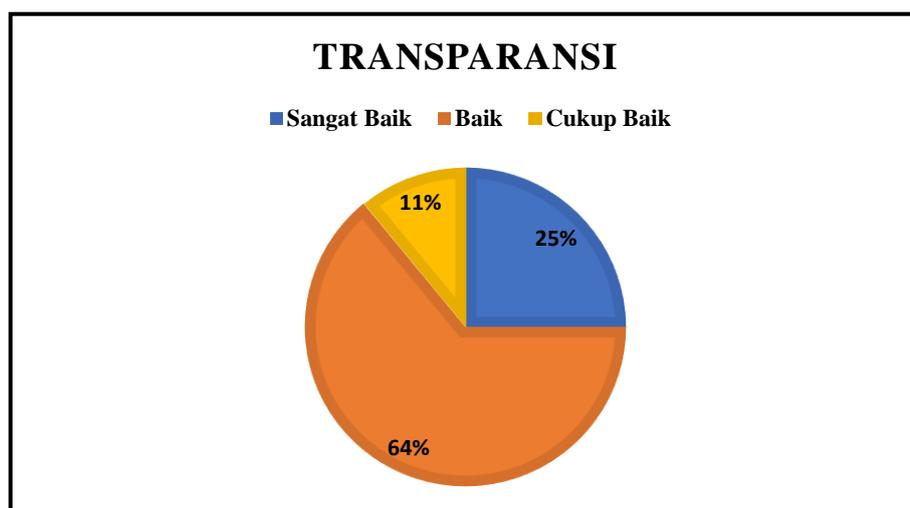
| No | Pernyataan | | SB | B | CB | KB | TB | Jumlah | Rata rata Skor | Kategori |
|----|---|------|-------|-------|-------|------|----|--------|----------------|-------------|
| 1 | Sepengatahuan anda, publik mendapatkan pengumuman oleh pemerintah daerah terkait kebijakan publik | F | 10 | 44 | 4 | 0 | 0 | 58 | | Baik |
| | | % | 17,24 | 75,86 | 6,90 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 50 | 176 | 12 | 0 | 0 | 238 | 4,10 | |
| 2 | Menurut anda, adanya sistem pemberian informasi kepada publik dapat meningkatkan kebijakan transparansi keuangan daerah | F | 13 | 38 | 7 | 0 | 0 | 58 | | Baik |
| | | % | 22,41 | 65,52 | 12,07 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 65 | 152 | 21 | 0 | 0 | 238 | 4,10 | |
| 3 | Sepengatahuan anda, public merasa mudah mengakses dokumen publik tentang keuangan daerah | F | 13 | 36 | 8 | 1 | 0 | 58 | | Baik |
| | | % | 22,41 | 62,07 | 13,79 | 1,72 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 65 | 144 | 24 | 2 | 0 | 235 | 4,05 | |
| 4 | Sepengatahuan anda, laporan pertanggungja waban tahunan selama ini tepat waktu | F | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58 | | Sangat Baik |
| | | % | 53,45 | 46,55 | 0 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 155 | 108 | 0 | 0 | 0 | 263 | 4,53 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|-------|-------|-------|---|---|-----|-------------|------|
| 5 | APBD disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat | F | 19 | 24 | 15 | 0 | 0 | 58 | | Baik |
| | | % | 32,76 | 41,38 | 25,86 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 95 | 96 | 45 | 0 | 0 | 236 | 4,06 | |
| 6 | APBD disajikan secara tepat kepada seluruh masyarakat | F | 15 | 33 | 10 | 0 | 0 | 58 | | Baik |
| | | % | 25,86 | 56,90 | 17,24 | 0 | 0 | 100 | | |
| | | Skor | 75 | 132 | 30 | 0 | 0 | 237 | 4,08 | |
| Total Rata – Rata Skor | | | | | | | | | 4,15 | |

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat disimpulkan bahwa dari jawaban responden mengenai pernyataan dari variabel Transparansi yaitu responden lebih dominan memilih kelompok jawaban baik, pada item pernyataan “Sepengatahuan anda, publik mendapatkan pengumuman oleh pemerintah daerah terkait kebijakan publik” sebanyak 44 dengan persentase rata – rata skor sebesar 75,86 %. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tanjungbalai sudah menerapkan indikator Transparansi dengan baik. Transparansi memiliki total rata – rata skor jawaban responden sebesar 4,15.

Adapun data tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar 4. 4 Diagram Transparansi

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya tanggapan responden pada item pernyataan di variabel transparansi berada dalam kategori baik dengan jumlah persentase sebanyak 64%.

4.2. Analisis Data

Berikut terdapat 2 model dan tahapan untuk menganalisis data dalam smart pls 4:

(1) model pengukuran (outer model), dan (2) analisis model structural (Inner model).

4.2.1. Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran (outer models) adalah suatu model yang mendeskripsikan hubungan antar variabel laten (konstruk) dengan indikator nya (Jualiandi, 2018)

4.2.1.1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen adalah sejauh mana ukuran berkolerasi positif dengan ukuran alternatif dari konstruk yang sama. Untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak adalah dilihat dari nilai outer loading. Jika nilai outer loading lebih besar dari 0,4 maka suatu indikator adalah valid (Jualiandi, 2018)

Tabel 4. 11. Validitas Konvergen

| Variabel | Item Pernyataan | Outer Loadings | | | | Kesimpulan |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------|----|---|------------|
| | | X1 | X2 | X3 | Y | |
| Pengawasan Internal (X1) | X1.1 | 0.725 | | | | Valid |
| | X1.2 | 0.861 | | | | Valid |
| | X1.3 | 0.528 | | | | Valid |
| | X1.4 | 0.741 | | | | Valid |
| | X1.5 | 0.812 | | | | Valid |
| | X1.6 | 0.916 | | | | Valid |
| Akuntabilitas (X2) | X2.1 | | 0.785 | | | Valid |
| | X2.2 | | 0.846 | | | Valid |
| | X2.3 | | 0.893 | | | Valid |
| | X2.4 | | 0.863 | | | Valid |
| | X2.5 | | 0.706 | | | Valid |
| | X2.6 | | 0.619 | | | Valid |
| | X2.7 | | 0.743 | | | Valid |

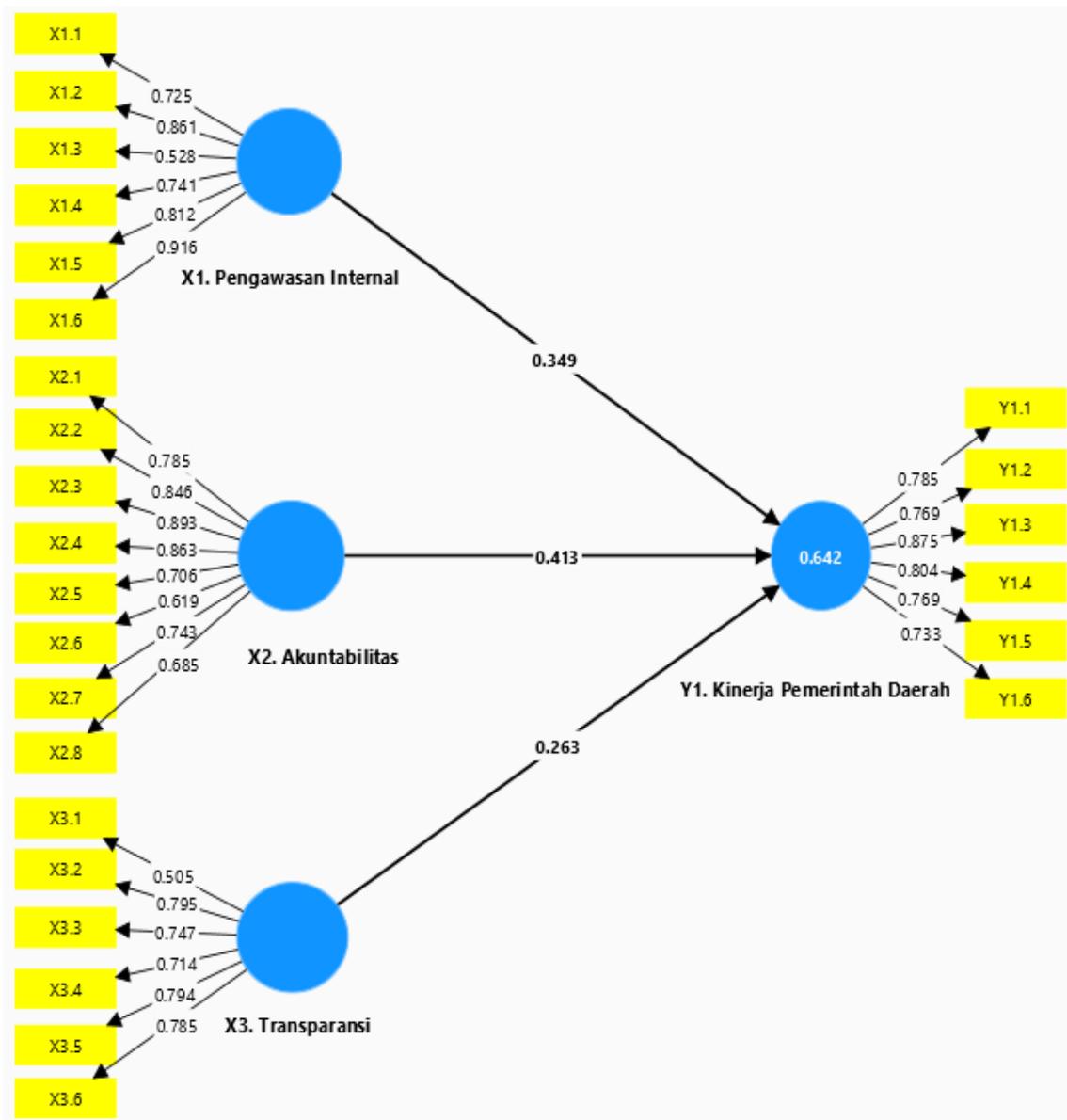
| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|-------|-------|-------|-------|
| | X2.8 | | 0.685 | | | Valid |
| Transparansi (X3) | X3.1 | | | 0.505 | | Valid |
| | X3.2 | | | 0.795 | | Valid |
| | X3.3 | | | 0.747 | | Valid |
| | X3.4 | | | 0.714 | | Valid |
| | X3.5 | | | 0.794 | | Valid |
| | X3.6 | | | 0.785 | | Valid |
| Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | Y1.1 | | | | 0.785 | Valid |
| | Y1.2 | | | | 0.769 | Valid |
| | Y1.3 | | | | 0.875 | Valid |
| | Y1.4 | | | | 0.804 | Valid |
| | Y1.5 | | | | 0.769 | Valid |
| | Y1.6 | | | | 0.733 | Valid |

Sumber: SEM PLS 2024

Pada tabel 4.9 memperlihatkan nilai – nilai outer loading, maka dapat di ambil kesimpulan nya sebagai berikut:

1. Variabel Pengawasan Internal (X1): item pernyataan yang valid adalah item pernyataan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6 karena nilai ($> 0,4$)
2. Variabel Akuntabilitas (X2): item pernyataan yang valid adalah item pernyataan X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8 karena nilai ($0 > 4$)
3. Variabel Transparansi (X3): item pernyataan yang valid adalah item pertanyaan X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, X3.6, X3.7, X3.8 karena nilai ($> 0,4$)
4. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y): item pernyataan yang valid adalah item pernyataan Y.1, Y.2, Y.3, Y.4, Y.5, Y.6 karena ($> 0,4$).

Berikut gambar yang menunjukkan Validitas Konvergen:



Gambar 4. 5. Outer Loading

4.2.1.2 Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Validitas diskriminan adalah bertujuan untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dengan nilai yang lain. Nilai cross loading masing – masing konstruk di evaluasi untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan intem

pengukuran lebih besar dari pada konstruk lainnya. Nilai cross loading yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali & Latan, 2015)

Tabel 4. 12. Cross Loading Tahap I

| | X1. Pengawasan Internal | X2. Akuntabilitas | X3. Transparansi | Y1. Kinerja Pemerintah Daerah |
|------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| X1.1 | 0.725 | 0.280 | 0.128 | 0.361 |
| X1.2 | 0.861 | 0.329 | 0.138 | 0.428 |
| X1.3 | 0.528 | 0.342 | 0.180 | 0.373 |
| X1.4 | 0.741 | 0.424 | 0.347 | 0.562 |
| X1.5 | 0.812 | 0.218 | 0.279 | 0.484 |
| X1.6 | 0.916 | 0.444 | 0.122 | 0.523 |
| X2.1 | 0.416 | 0.785 | 0.316 | 0.670 |
| X2.2 | 0.432 | 0.846 | 0.199 | 0.580 |
| X2.3 | 0.306 | 0.893 | 0.433 | 0.516 |
| X2.4 | 0.249 | 0.863 | 0.339 | 0.451 |
| X2.5 | 0.122 | 0.706 | 0.215 | 0.281 |
| X2.6 | 0.195 | 0.619 | 0.035 | 0.113 |
| X2.7 | 0.284 | 0.743 | 0.529 | 0.635 |
| X2.8 | 0.531 | 0.685 | 0.576 | 0.577 |
| X3.1 | 0.293 | 0.405 | 0.505 | 0.361 |
| X3.2 | 0.208 | 0.422 | 0.795 | 0.498 |
| X3.3 | 0.213 | 0.406 | 0.747 | 0.410 |
| X3.4 | 0.079 | 0.350 | 0.714 | 0.371 |
| X3.5 | 0.095 | 0.201 | 0.794 | 0.305 |
| X3.6 | 0.254 | 0.261 | 0.785 | 0.418 |
| Y1.1 | 0.566 | 0.453 | 0.379 | 0.785 |
| Y1.2 | 0.423 | 0.527 | 0.408 | 0.769 |
| Y1.3 | 0.575 | 0.748 | 0.437 | 0.875 |
| Y1.4 | 0.325 | 0.622 | 0.516 | 0.804 |
| Y1.5 | 0.449 | 0.426 | 0.436 | 0.769 |
| Y1.6 | 0.511 | 0.458 | 0.455 | 0.733 |

Sumber: SEM PLS 2024

Berdasarkan pada tabel 4.12 diperoleh hasil dari pengujian cross loading tersebut menunjukkan bahwa nilai outer loading dari masing – masing item pernyataan indikator terhadap konstruk nya masih ada yang di bawah 0,7 yaitu pada item pernyataan X1.3,

X2.6, X2.8, X3.1. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk atau variabel laten belum memiliki diskriminan yang baik.

Dari hasil pengujian cross loading tersebut indikator pernyataan X1.3, X2.6, X2.8, X3.1 mempunyai nilai outer loading di bawah 0,7 sehingga ke empat indikator pernyataan lebih baik di hapus dari model.

4.2.1.3 Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) Setelah Dilakukannya Modifikasi

Setelah dilakukan nya penghapusan indikator pernyataan yang tidak lolos uji discriminant validity tahap pertama, maka akan dilakukan nya uji diskriminan validity tahap kedua, berikut hasil uji discriminant validity tahap kedua yaitu:

Tabel 4. 13 Cross Loading Tahap II

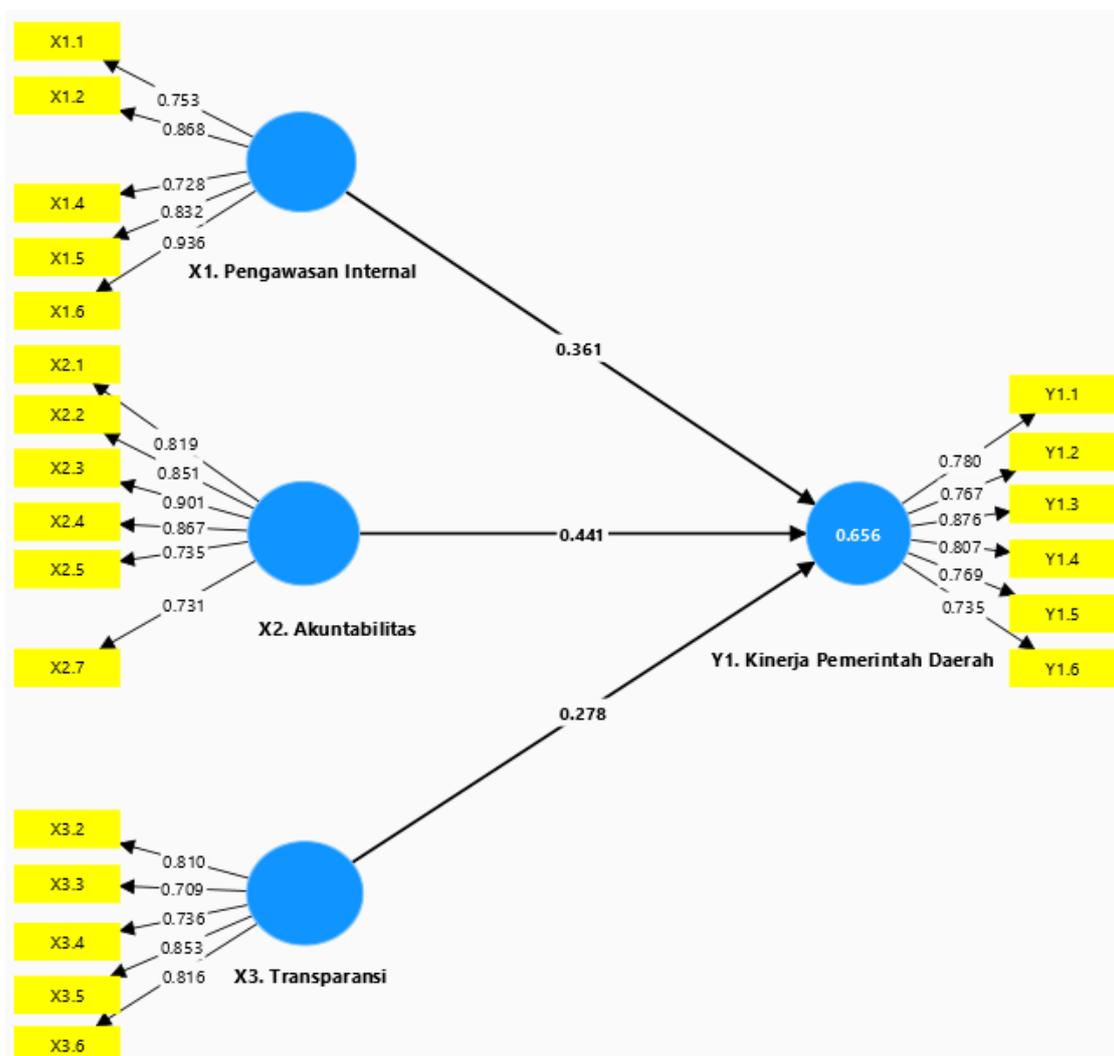
| | X1. Pengawasan Internal | X2. Akuntabilitas | X3. Transparansi | Y1. Kinerja Pemerintah Daerah |
|------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| X1.1 | 0.753 | 0.229 | 0.116 | 0.361 |
| X1.2 | 0.868 | 0.293 | 0.086 | 0.428 |
| X1.4 | 0.728 | 0.385 | 0.329 | 0.561 |
| X1.5 | 0.832 | 0.169 | 0.243 | 0.483 |
| X1.6 | 0.936 | 0.389 | 0.092 | 0.521 |
| X2.1 | 0.391 | 0.819 | 0.290 | 0.672 |
| X2.2 | 0.420 | 0.851 | 0.144 | 0.581 |
| X2.3 | 0.284 | 0.901 | 0.422 | 0.518 |
| X2.4 | 0.220 | 0.867 | 0.320 | 0.453 |
| X2.5 | 0.096 | 0.735 | 0.167 | 0.282 |
| X2.7 | 0.251 | 0.731 | 0.452 | 0.637 |
| X3.2 | 0.238 | 0.395 | 0.810 | 0.501 |
| X3.3 | 0.224 | 0.359 | 0.709 | 0.410 |
| X3.4 | 0.020 | 0.330 | 0.736 | 0.371 |
| X3.5 | 0.095 | 0.132 | 0.853 | 0.307 |
| X3.6 | 0.238 | 0.209 | 0.816 | 0.418 |
| Y1.1 | 0.536 | 0.428 | 0.334 | 0.780 |
| Y1.2 | 0.391 | 0.496 | 0.394 | 0.767 |
| Y1.3 | 0.545 | 0.755 | 0.405 | 0.876 |

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|--------------|
| Y1.4 | 0.308 | 0.634 | 0.518 | 0.807 |
| Y1.5 | 0.456 | 0.402 | 0.399 | 0.769 |
| Y1.6 | 0.529 | 0.427 | 0.441 | 0.735 |

Sumber: SEM PLS 2024

Berdasarkan pada tabel 4.13 diperoleh hasil dari pengujian ulang cross loading tersebut menunjukkan bahwa nilai outer loading dari masing – masing item pernyataan indikator terhadap konstruk nya lebih besar dari pada nilai cross loading. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk atau variabel laten sudah memiliki diskriminan yang baik.

Berikut gambar yang menunjukkan Cross Loading adalah:



Gambar 4. 6 Cross Loading

4.2.1.4 Validitas dan Realibilitas Konstruk (Construct Reliability and Validity)

Validitas dan realibilitas konstruk adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menilai kehandalan suatu konstruk (Juandi, 2018). Pengujian validitas dan realibilitas konstruk menggunakan nilai composite realibility memiliki kriteria nilai realibilitas sebesar > 0.600 dapat dikatakan reliabel. (Hair et al., 2017)

Tabel 4. 14. Validitas dan Realibilitas Konstruk

| | Cronbach's alpha | (rho_a) | Composite reliability (rho_c) | Average variance extracted (AVE) |
|-------------------------------|------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| X1. Pengawasan Internal | 0.883 | 0.892 | 0.915 | 0.684 |
| X2. Akuntabilitas | 0.903 | 0.918 | 0.924 | 0.672 |
| X3. Transparansi | 0.845 | 0.853 | 0.890 | 0.619 |
| Y1. Kinerja Pemerintah Daerah | 0.879 | 0.890 | 0.909 | 0.625 |

Sumber: SEM PLS 2024

Berdasarkan pada tabel 4.14 data composite realibility dapat disimpulkan hasil dari pengujian yang di peroleh adalah sebagai berikut:

1. Variabel X1 (Pengawasan Internal) memiliki nilai composite realibility sebesar $0.915 > 0.600$ yang berarti variabel Pengawasan Internal adalah reliabel.
2. Variabel X2 (Akuntabilitas) memiliki nilai composite realibility sebesar $0.924 > 0.600$ yang berarti variabel Akuntabilitas adalah reliabel.
3. Variabel X3 (Transparansi) memiliki nilai composite realibility sebesar $0.890 > 0.600$ yang berarti variabel Transparansi adalah reliabel.
4. Variabel Y (Kinerja Pemerintah Daerah) memiliki nilai composite realibility sebesar $0.909 > 0.600$ yang berarti variabel Kinerja Pemerintah Daerah adalah reliabel.

4.2.1 Analisis Model Struktural (Inner Model)

Analisis model struktural (inner model) adalah suatu model yang menjelaskan suatu hubungan antar variabel konstruk. Teori atau asumsi – asumsi berdasarkan hubungan variabel antar konstruk (Jualiandi, 2018)

5.2.1.1 Kolinearitas (*Colinierity / Variance Inflation Factor / VIF*)

Pengujian kolinearitas (*Colinierity / Variance Inflation Factor / VIF*) adalah untuk membuktikan suatu korelasi yang menyatakan kuat atau tidak nya antar variabel konstruk. Apabila terdapat nilai VIF > 5.00 yang artinya terjadi masalah kolinearitas, dan apabila terdapat nilai VIF lebih kecil dari < 5.00 yang artinya tidak terjadi masalah kolinearitas (Hair et al., 2017)

Tabel 4. 15 Kolinearitas

| | Y. Kinerja Pemerintah Daerah |
|------------------------------|------------------------------|
| X1. Pengawasan Internal | 1.164 |
| X2. Akuntabilitas | 1.293 |
| X3. Transparansi | 1.178 |
| Y. Kinerja Pemerintah Daerah | |

Sumber: SEM PLS 2024

Berdasarkan pada tabel 4.15 Kolinearitas dapat disimpulkan hasil dari pengujian yang di peroleh adalah sebagai berikut:

1. VIF untuk Kolinearitas variabel X1 (Pengawasan Internal) dengan variabel Y (Kinerja Pemerintah Daerah) adalah sebesar $1.164 < 5.00$ artinya tidak terjadi masalah kolinearitas.
2. VIF untuk Kolinearitas variabel X2 (Akuntabilitas) dengan variabel Y (Kinerja Pemerintah Daerah) adalah sebesar $1.293 < 5.00$ artinya tidak terjadi masalah kolinearitas.

3. VIF untuk Kolinearitas variabel X3 (Transparansi) dengan variabel Y (Kinerja Pemerintah Daerah) adalah sebesar $1.178 < 5.00$ artinya tidak terjadi masalah kolinearitas.

5.2.1.2 R-Square

R-Square adalah mengukur keakuratan prediksi suatu nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Yang berguna untuk mengetahui baik atau buruknya suatu model (Jualiandi, 2018)

Terdapat kriteria dari R-Square (Jualiandi, 2018):

1. Jika nilai $R^2 = 0.75$ → Model adalah substansial (kuat)
2. Jika nilai $R^2 = 0.50$ → Model adalah moderate (sedang)
3. Jika nilai $R^2 = 0.25$ → Model adalah substansial (buruk)

Tabel 4. 16. R-Square

| | <i>R-Square</i> | <i>R-Square Adjusted</i> |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Y. Kinerja Pemerintah Daerah | 0.656 | 0.637 |

Sumber: SEM PLS 2024

Berdasarkan pada tabel 4.16 R- Square dapat disimpulkan hasil dari pengujian yang di peroleh adalah sebagai berikut:

R-Square model sebesar 0.656 yang berarti kemampuan variabel X1 (Pengawasan Internal), X2 (Akuntabilitas) dan X3 (Transparansi) dalam menjelaskan Y (Kinerja Pemerintah Daerah) adalah sebesar 65,6% hal ini menunjukkan model yang tergolong moderate (sedang).

5.2.1.3 F-Square

F-Square adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai dampak suatu relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran F^2 (F-Square) berdampak pada perubahan R^2 yang berarti perubahan nilai R^2 terjadi pada saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substantif pada konstruk endogen (Jualiandi, 2018)

Terdapat kriteria dari F-Square (Jualiandi, 2018)

1. Jika nilai $F^2 = 0.02 \rightarrow$ Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen.
2. Jika nilai $F^2 = 0.15 \rightarrow$ Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.
3. Jika nilai $F^2 = 0.35 \rightarrow$ Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4. 17. F-Square

| | Y. Kinerja Pemerintah Daerah |
|------------------------------|------------------------------|
| X1. Pengawasan Internal | 0.326 |
| X2. Akuntabilitas | 0.437 |
| X3. Transparansi | 0.191 |
| Y. Kinerja Pemerintah Daerah | |

Sumber: SEM PLS 2024

Berdasarkan pada tabel 4.16 F-Square dapat disimpulkan hasil dari pengujian yang di peroleh adalah sebagai berikut:

1. Variabel X1 (Pengawasan Internal) terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah) memiliki nilai $F^2 = 0.326$ artinya memiliki efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.
2. Variabel X2 (Akuntabilitas) terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah) memiliki nilai $F^2 = 0.437$ artinya memiliki efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen

3. Variabel X3 (Transparansi) terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah) memiliki nilai $F^2 = 0.191$ artinya memiliki efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen.

5.2.1.4 Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Pengaruh langsung (Direct Effect) adalah suatu pengujian hipotesis pengaruh langsung variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang di pengaruhi (endogen) (Jualiandi, 2018)

Berikut kriteria pada koefisien jalur (Path Coefficient) adalah:

1. Jika nilai koefisien jalur adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel terhadap variabel lain adalah searah, dan apabila nilai suatu variabel eksogen meningkat atau naik, hal ini menunjukkan bahwa variabel endogen juga meningkat atau naik.
2. Jika nilai koefisien jalur adalah negative, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, apabila nilai suatu variabel eksogen meningkat atau naik, hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel endogen menurun.

Berikut kriteria probabilitas atau signifikansi (P-Value) adalah:

1. Jika nilai probabilitas (P-Value) $< \text{Alpha } (0,05)$ maka H_0 ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lain nya adalah signifikan).
2. Jika nilai probabilitas (P-Value) $> \text{Alpha } (0,05)$ maka H_0 diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lain nya adalah tidak signifikan).

Tabel 4. 18. Pengaruh Langsung (Direct Effect)

| | original sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T statistics (O/STDEV) | P Values |
|---|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| X1. Pengawasan Internal → Kinerja Pemerintah Daerah | 0.361 | 0.359 | 0.111 | 3.269 | 0.001 |
| X2. Akuntabilitas → Kinerja Pemerintah Daerah | 0.441 | 0.446 | 0.092 | 4.785 | 0.000 |
| X3. Transparansi → Kinerja Pemerintah Daerah | 0.278 | 0.286 | 0.082 | 3.376 | 0.001 |

Sumber: SEM PLS 2024

Berdasarkan pada tabel 4.18 Pengaruh langsung (Direct Effect) dapat dilihat disimpulkan hasil dari pengujian yang di peroleh adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung (X1) Pengawasan Internal terhadap (Y) Kinerja Pemerintah Daerah memiliki koefisien jalur sebesar 0.361 (positif), dan memiliki nilai P-Value sebesar $0.001 < 0.05$. Hal ini menunjukkan (X1) Pengawasan Internal berpengaruh positif signifikan terhadap (Y) Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh langsung (X2) Akuntabilitas terhadap (Y) Kinerja Pemerintah Daerah memiliki koefisien jalur sebesar 0.441 (positif), dan memiliki nilai P-Value sebesar $0.000 > 0.05$. Hal ini menunjukkan (X2) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap (Y) Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh langsung (X3) Transparansi terhadap (Y) Kinerja Pemerintah Daerah memiliki koefisien jalur sebesar 0.278 (positif), dan memiliki nilai P-Value sebesar $0.001 > 0.05$. Hal ini menunjukkan (X3) Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap (Y) Kinerja Pemerintah Daerah.

5.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan internal merupakan penilaian yang dibentuk dalam organisasi yang melaksanakan kegiatannya untuk organisasi tersebut. Pengawasan internal juga membantu anggota organisasi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan menyediakan mereka berbagai penilaian, nasihat, analisis, rekomendasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa (Rozi et al., 2021). Pengawasan internal merupakan aparat pengawas yang melaksanakan pengawasan di lingkungan internal suatu instansi pemerintah (Rahayu & Hendaris, 2022).

Pengaruh langsung variabel X1 (Pengawasan Internal) terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah) memiliki koefisien jalur sebesar 0.361 (positif), hal ini menunjukkan peningkatan nilai variabel pengawasan internal akan di ikuti peningkatan jalur kinerja pemerintah daerah. Pengaruh variabel pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki nilai P-Value sebesar $0.001 < 0.05$. Hal ini menunjukkan X1 (Pengawasan Internal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah).

Pengukuran pengawasan internal dapat dicapai berdasarkan indikator yang telah ditentukan yaitu Preventive Control dan Representative Control. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan terhadap pernyataan dari setiap indikator di peroleh hasil nilai outer loading terbesar yaitu dari item pernyataan nomor 6 yaitu “sebaik nya terdapat langkah – langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terbentuk nya operasi komputer” sebesar 0.916 dan nilai outer loading terendah sebesar 0,528 pada item

pernyataan nomor 3 “setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh bukti transaksi valid dan sah.

Nilai outer loading tertinggi sebesar 0,916 pada item pernyataan nomor 6 “sebaik nya terdapat langkah – langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terbentuk nya operasi komputer”. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa perlu nya menekankan perencanaan ini agar operasi komputer tetap efektif dan efisien dan mengurangi dampak jika kerusakan atau masalah yang terjadi sehingga tidak mengganggu operasi komputer secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat menyetujui dengan pernyataan nomor 6 yang artinya langkah – langkah yang ditetapkan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada di instansi pemerintah.

Sedangkan nilai outer loading terendah sebesar 0,528 pada item pernyataan nomor 3 “setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh bukti transaksi valid dan sah”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perlu nya menekankan penting nya dokumentasi dan bukti yang kuat untuk mendukung setiap transaksi dalam suatu sistem atau proses sehingga mempermudah proses verifikasi untuk mengecek kesalahan transaksi dan mencegah penipuan atau kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyetujui dengan pernyataan yang nomor 3 yang artinya transaksi yang dilakukan di instansi tidak terlalu didukung oleh bukti transaksi.

Berdasarkan deskripsi pada variabel pengawasan internal hasil dari deskripsi dan jawaban responden adalah 72% mengatakan sangat baik, 28 % mengatakan baik.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang artinya pengawasan internal yang baik akan meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan tugas dan juga untuk mendorong terwujudnya pertanggung jawaban atas pelaksanaan program atau kegiatan yang semakin lama semakin baik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, good governance, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Jatmiko, 2020).

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Pengawasan Internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang artinya bahwa pengawasan internal yang belum optimal dapat menurunkan kinerja instansi. Kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagus tidak nya pengawasan internal yang dimiliki pemerintah daerah. Karena sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien, secara optimal akan membawa dampak positif bagi pemerintah daerah, untuk menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik (Karlina et al., 2023).

Berdasarkan penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil tersebut bermakna bahwa nilai yang positif mengindikasikan bahwa jika nilai pengawasan internal meningkat, maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat dan nilai yang signifikan mengindikasikan bahwa pengawasan internal berperan dalam mempengaruhi langsung kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

4.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajiban yang akan dipertanggung jawabkan kepada lingkungan (D. P. Saragih & Alpi, 2023). Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kapasitas

organisasi untuk mengenali, menerima, dan bertanggung jawab atas perannya dalam manajemen bisnis. Akuntabilitas (Nurazizza & Sudrajat, 2023).

Pengaruh langsung variabel X2 (Akuntabilitas) terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah) memiliki koefisien jalur sebesar 0.441 (positif), hal ini menunjukkan peningkatan nilai variabel transparansi akan di ikuti peningkatan jalur kinerja pemerintah daerah. Pengaruh variabel akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki nilai P – Value sebesar $0.000 > 0.05$. Hal ini menunjukkan X2 (Akuntabilitas) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah).

Pengukuran akuntabilitas dapat dicapai berdasarkan indikator yang telah ditentukan yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan terhadap pernyataan dari setiap indikator diperoleh hasil nilai outer loading terbesar yaitu dari item pernyataan nomor 3 “prosedur sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik” sebesar 0,893 dan nilai outer loading terendah sebesar 0,619 pada item pernyataan nomor 6 “adanya pertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal”

Nilai outer tertinggi sebesar 0,893 pada item pernyataan nomor 3 “prosedur sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan sudah memberikan hasil yang memuaskan dan memenuhi tujuan yang di inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat menyetujui dengan pernyataan nomor 3 yang artinya prosedur sistem informasi sudah digunakan dengan baik.

Sedangkan nilai outer loading terendah sebesar 0,619 pada item pernyataan nomor 6 “adanya pertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perlunya pendekatan yang rasional dan ekonomis dalam pengambilan keputusan terkait program atau solusi. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup menyetujui dengan pernyataan yang nomor 6 yang artinya responden masih perlu nya pertimbangan untuk memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan deskripsi pada variabel akuntabilitas hasil dari deskripsi dan jawaban responden adalah 68% mengatakan sangat baik, 25% mengatakan baik, 11% mengatakan cukup baik.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang artinya dengan ini menunjukan bahwa dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah bisa mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai oleh pihak internal maupun eksternal (Putri & Riharjo, 2021).

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang artinya penyebab akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah karena pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik sehingga dapat

disimpulkan bahwa akuntabilitas yang buruk dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah (Jitmau et al., 2017).

Berdasarkan penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil tersebut bermakna bahwa nilai yang positif mengindikasikan bahwa jika nilai akuntabilitas meningkat, maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat dan nilai yang signifikan mengindikasikan bahwa akuntabilitas berperan dalam mempengaruhi langsung kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

4.3.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh public (Putra et al., 2023)

Pengaruh langsung variabel X3 (Transparansi) terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah) memiliki koefisien jalur sebesar 0.278 (positif), hal ini menunjukkan peningkatan nilai variabel transparansi akan di ikuti peningkatan jalur kinerja pemerintah daerah. Pengaruh variabel transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah memiliki nilai P – Value sebesar $0.001 > 0.05$. Hal ini menunjukkan X3 (Transparansi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah).

Pengukuran transparansi dapat dicapai berdasarkan indikator yang telah ditentukan yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, hak masyarakat terhadap akses informasi, ketepatan dalam pelaporan dan kualitas informasi yang disampaikan. Hasil

dari analisis data yang telah dilakukan terhadap pernyataan dari setiap indikator di peroleh hasil nilai outer loading terbesar yaitu dari item pernyataan nomor 5 “APBD disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat” sebesar 0,794 dan nilai outer loading terendah sebesar 0,505 pada item pernyataan nomor 1 “sepengetahuan anda, publik mendapatkan pengumuman oleh pemerintah daerah terkait kebijakan publik”.

Nilai outer loading tertinggi sebesar 0,794 pada item pernyataan nomor 5 “APBD disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat”. Hasil ini analisis menunjukkan bahwa perlu adanya pemerintah daerah menyediakan informasi anggaran secara terbuka, memungkinkan publik untuk melihat dan memahami bagaimana dana dikelola dan digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyetujui dengan pernyataan nomor 5 yang artinya pemerintah telah menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

Sedangkan nilai outer loading terendah sebesar 0,505 pada item pernyataan nomor 1 “sepengetahuan anda, publik mendapatkan pengumuman oleh pemerintah daerah terkait kebijakan publik”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan publik diketahui dan di pahami oleh masyarakat sehingga meningkatkan keterlibatan publik. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup menyetujui dengan pernyataan nomor 1 yang artinya yang dilakukan pemerintah daerah terkait kebijakan publik masih kurang.

Berdasarkan deskripsi pada variabel transparansi hasil dari deskripsi dan jawaban responden adalah 68% mengatakan baik, 25% mengatakan sangat baik, dan 11% mengatakan cukup baik.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang artinya pemerintah harus memberikan keterbukaan terhadap informasi meliputi; akses informasi yang mudah; adanya penyusunan mekanisme pengaduan tentang pelanggaran; adanya informasi melalui media massa dan lembaga non pemerintahan; adanya informasi tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab (Jatmiko, 2020).

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang artinya pernyataan ini diperkuat karena peran transparansi kebijakan publik tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya keterbukaan anggaran terhadap masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan anggaran dalam hal ini masih kurang dan perlu adanya perbaikan. Dampaknya masyarakat jadi kurang mengerti hasil dari pertanggungjawaban aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak instansi pemerintah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan kepada publik karena laporan keuangan tersebut masih belum disajikan secara menyeluruh dan sifatnya tertutup (Kiri & Handayani, 2021)

Berdasarkan penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil tersebut bermakna bahwa nilai yang positif mengindikasikan bahwa jika nilai transparansi meningkat, maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat dan nilai yang signifikan mengindikasikan bahwa transparansi berperan dalam mempengaruhi langsung kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di deskripsikan di atas maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan jika semakin baik pengawasan internal pada organisasi perangkat daerah maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.
2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan jika semakin baik akuntabilitas pada organisasi perangkat daerah maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.
3. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan jika semakin baik transparansi pada organisasi perangkat daerah maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang telah diuraikan maka peneliti dapat memberikan saran adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel pengawasan internal, terdapat beberapa responden yang mengatakan cukup baik sehingga diperlukan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal yang ada untuk mengidentifikasi area yang memerlukan

perbaikan. Hal ini bisa meliputi penilaian prosedur, mekanisme kontrol, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

2. Pada variabel akuntabilitas, terdapat beberapa responden yang mengatakan cukup baik sehingga diperlukan untuk melakukan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penggunaan anggaran dapat diakses dan dipahami oleh publik serta menyediakan informasi yang jelas dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.
3. Pada variabel transparansi, terdapat beberapa responden yang mengatakan kurang baik sehingga diperlukan untuk melakukan peningkatan konsistensi dan keteraturan dalam komunikasi publik. Dan rutin mengeluarkan laporan dan pembaharuan mengenai kegiatan dan keputusan pemerintah dengan ini dapat membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Adrianto, N. (2017). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Ambarwati. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi. *Journal of Business and Economics (JBE)*, 6, 88–96.
- Chabib, S., & Suripto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah*. Fokus Media.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good governance melalui pelayanan public*. Gadjahmada university press.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. CV. Berkah Utami.
- Feriyanto, A., & Triana, E. S. (2015). *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Mediatara.
- Ghartery, J. B. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hair, J. J. F., Sarstedt, M., C.M, R., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Halim, A. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia (II)*. BPF.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. BPF.
- Hantono. (2020). *Metodologi Penelitian skripsi dengan Aplikasi SPSS*. Grub Penerbitan CV Budi Utama.
- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan pada Perum Perumnas regional 1 Medan. *Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 7–15.
- Hasibuan, M. S. . (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7, 231–241.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 8, 276–285.
- Johan, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Islam Indonesia.
- Jualiandi, A. (2018). *Pelatihan SEM - PLS Program Pascasarjana Universitas Batam (hal. Structural equation model based partial least square (SEM PLS):Menggunakan SmartPLS)*. Universitas Batam.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU PRESS.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rajawali Pers.

- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1, 300–306.
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Inten Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–17.
- Krina, L. L. (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kusumastuti, Penny, & Lukito. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lalolo Krina, L. (2003). *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- LAN, & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (II)*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., Andre, H., & Purwanugraha. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Melasari, R., Rosliana, & Silvionita, P. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Opd Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11, 106–118.
- Mukarom, Z., & Wijaya, M. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Cv. Pustaka Setia.
- Mulyadi. (2001). *Pemeriksaan dalam Pengawasan*. Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2015). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(22–28).
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. 3, 94–114.
- Nawawi. (2002). *Pengawasan Intern*. Alfabeta.
- Novitasari, D. R., & Prabowo, T. J. W. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang). *Accounting, Diponegoro Journal Of*, 9, 1–8.
- Nurazizza, V., & Sudrajat, M. A. (2023). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 5, 5, 1–15.
- Putra, A. S., Junita, A., & Azhar, I. (2023). Systematic Literature Review: Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai Skpk. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 169–177.

- Putri, O. B., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Transparansi, Budaya Organisasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1–19).
- Rahayu, I., & Hendaris, R. B. (2022). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9, 2869–2879.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif Uu No. 17/2002 Tentang Keuangan Negara*. Pnri.
- Rizki, M. S., & Rialdy, N. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 12, 522–537.
- Robbins, P. (2014). *Manajemen, diterjemahkan oleh Bob Sabran*. Jakarta: Erlangga. Erlangga.
- Rozi, F., Sari, M., & Astuty, W. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan Internal Dan Key Performance Indicators (Kpi) Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Bekerja Sebagai Variabel Moderating Di Perum Perumnas Regional I Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21, 270–280.
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 5, 1–10.
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8, 1–34.
- Sari, E. N., Muhyarsyah, & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 21, 166–197.
- Sembiring, M. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 1, 1*, 121–133.
- Siagian, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi*. PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18, 93–101.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (II)*. UPP STIM YKPN.
- Subhan, A. (2017). *Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Jaringan*. Universitas Padjadjaran.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Cendekia Press.
- Swasto, B. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. UB Press.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Indonesia Press.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administrasi, and Development: Making the State Work*. MacMillan Press Ltd.

- Ula, C. (2018). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pada organisasi perangkat daerah (studi pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten tegal, bumd kab tegal, ikatan profesi notariat, camat dan lurah kab tegal)*. Akuntansi, Wahid Hasyim, Semarang.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik*. Mandar Maju.
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers.

Lampiran 1. Kuesioner

**KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI
PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA OPD KOTA TANJUNGBALAI)**

Kepada Yth. Bapak / Ibu

Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tanjungbalai

Di Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Saya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner yang diberikan. Kuesioner ini diberikan untuk data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota Tanjungbalai).

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Penelitian ini semata-mata bersifat ilmiah dan hanya dipergunakan untuk keperluan penyusunan skripsi, disamping itu juga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi peneliti. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Ellen Angelina
2005170002

A. Identitas Responden

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data dibawah ini:

Nama:

Umur:

Jenis Kelamin:

Pendidikan Terakhir:

Nama Instansi:

Lama Kerja:

B. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- a. SB: Sangat Baik: dengan Skor 5
- b. B: Baik: dengan Skor 4
- c. CB: Cukup Baik: dengan Skor 3
- d. KB: Kurang Baik: dengan Skor 2
- e. TB: Tidak Baik: dengan Skor 1

1. KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Y)

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|--------------------|---|---------|---|----|----|----|
| | | SB | B | CB | KB | TB |
| Ekonomi | | | | | | |
| 1 | Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan kinerja pemerintah daerah. | | | | | |
| 2 | Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan kinerja pemerintah daerah. | | | | | |
| Efisiensi | | | | | | |
| 3 | Pada instansi tempat Saya bekerja, pemerintah daerah melakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan | | | | | |
| 4 | Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. | | | | | |
| Efektivitas | | | | | | |
| 5 | Pada instansi tempat Saya bekerja, Pemerintah daerah menggunakan LAKIP sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan | | | | | |
| 6 | Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja pemerintah daerah dengan program dan kebijakan. | | | | | |

2. PENGAWASAN INTERNAL (X1)

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|----|----|----|
| | | SB | B | CB | KB | TB |
| Pengawasan Preventif | | | | | | |
| 1 | Standard operating procedure (SOP) sebaiknya dibuatkan untuk penyelenggaraan kegiatan pengelola anggaran. | | | | | |
| 2 | Suatu kegiatan atau transaksi sebaiknya dilakukan pemisahan wewenang secara tepat. | | | | | |
| 3 | Setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh bukti transaksi valid dan sah. | | | | | |
| Pengawasan Korektif | | | | | | |
| 4 | Sebaiknya terdapat tindakan disiplin yang tepat apabila terjadi penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. | | | | | |
| 5 | Sebaiknya terdapat pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses. | | | | | |
| 6 | Sebaiknya terdapat Langkah – Langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terbentuk nya operasi komputer | | | | | |

3. AKUNTABILITAS (X₂)

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|--|---|---------|---|----|----|----|
| | | SB | B | CB | KB | TB |
| Akuntabilitas hukum dan kejujuran | | | | | | |
| 1 | Adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang di isyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana publik | | | | | |
| 2 | Tidak adanya penyalahgunaan jabatan (abuse of power) selama periode pemerintahan daerah | | | | | |
| Akuntabilitas Proses | | | | | | |
| 3 | Prosedur sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik | | | | | |
| 4 | Prosedur administrasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik | | | | | |
| Akuntabilitas Program | | | | | | |
| 5 | Tujuan yang semula ditetapkan tercapai dengan baik. | | | | | |
| 6 | Adanya pertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal | | | | | |
| Akuntabilitas Kebijakan | | | | | | |
| 7 | Laporan keuangan daerah dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada Masyarakat luas (horizontal) | | | | | |
| 8 | Adanya pertanggungjawaban atas kebijakan – kebijakan yang diambil terhadap Masyarakat luas | | | | | |

4. TRANSPARANSI (X₃)

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|--|---|---------|---|----|----|----|
| | | SB | B | CB | KB | TB |
| Komunikasi Publik Oleh Pemerintah | | | | | | |
| 1 | Sepengatahuan anda, public mendapatkan pengumuman oleh pemerintah daerah terkait kebijakan publik | | | | | |
| 2 | Menurut anda, adanya sistem pemberian informasi kepada public dapat meningkatkan kebijakan transparansi keuangan daerah | | | | | |
| Hak Masyarakat Terhadap Akses Informasi | | | | | | |
| 3 | Sepengatahuan anda, public merasa mudah mengakses dokumen public tentang keuangan daerah | | | | | |
| Ketepatan dalam Pelaporan | | | | | | |
| 4 | Sepengatahuan anda, laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini tepat waktu | | | | | |
| Kualitas Informasi Yang Disampaikan | | | | | | |
| 5 | APBD disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat | | | | | |
| 6 | APBD disajikan secara tepat kepada seluruh masyarakat | | | | | |

Lampiran 2. Data Responden

| Nama | Umur | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | Instansi | Lama Kerja |
|-------------------------|----------|---------------|---------------------|---|------------|
| Elfira dewi MS.S.STP | 34 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 10 Tahun |
| Evi sapriani | 43 Tahun | Perempuan | S1 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | 9 Tahun |
| Siti Patimah | 38 Tahun | Perempuan | S2 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | 19 Tahun |
| Abdillah Panji Pangestu | 42 Tahun | Laki – Laki | S1 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8 Tahun |
| Muslim | 53 Tahun | Laki – Laki | S2 | Sekretariat Daerah | 25 Tahun |
| Siti Qomariah | 38 Tahun | Perempuan | Sma | Dinas Perhubungan | 8 Tahun |
| Chairun nisa nasution | 45 Tahun | perempuan | S1 | Kecamatan Datuk Bandar | 9 Tahun |
| H. Kumpul Lubis, SP | 56 Tahun | Laki – Laki | S1 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 27 Tahun |
| soniah | 47 Tahun | Perempuan | S1 | Kecamatan Datuk Bandar Timur | 17 Tahun |
| Ahmad Azhar, S.Sos | 46 Tahun | Laki – Laki | S1 | Kesatuan Polisi Pamong Praja | 19 Tahun |
| Suly Rahayu | 35 Tahun | Perempuan | Sma | Kecamatan Tanjungbalai Utara | 8 Tahun |
| Amailya alrota.s | 40 Tahun | Perempuan | S1 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan | 14 Tahun |
| Muhammad fitrah | 31 Tahun | Laki – laki | S1 | Dinas Sosial | 7 Tahun |
| mahzulina | 49 Tahun | Perempuan | Sma | Dinas Pendidikan | 26 Tahun |
| Ir. Harlina nasution | 45 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 7 Tahun |
| Maria ulfa Panjaitan | 40 Tahun | Perempuan | S2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat | 19 Tahun |
| Seri lestari | 45 Tahun | Perempuan | S1 | Inspektorat Daerah | 6 Tahun |
| Tuti Lestari, SE., MM | 42 Tahun | Perempuan | S2 | Dinas Lingkungan Hidup | 15 Tahun |
| Miftah Rizka Hasibuan | 23 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 5 Bulan |
| Putri utami | 39 Tahun | Perempuan | S1 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3 Tahun |
| Pimrizki Lubis, SE | 50 Tahun | Laki – Laki | S1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23 Tahun |
| Mimi Handayani | 46 Tahun | Perempuan | S2 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 13 Tahun |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------|-----|--|----------|
| Darwansyah Merta Wijaya, S.Ip, MM | 37 Tahun | Laki – Laki | S2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 9 Bulan |
| Budi Ismail Siregar | 41 Tahun | Laki – Laki | S1 | Dinas Kesehatan | 13 Tahun |
| Rini Diana, SE., MM | 51 Tahun | Perempuan | S2 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 30 Tahun |
| Handri Agustiar Lubis | 30 Tahun | Laki – Laki | S1 | Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata | 17 Tahun |
| Bisniuludfi Sirait, S.Sos, M.Si | 30 Tahun | Laki – Laki | S2 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 30 Tahun |
| Evelina Situmorang, SE | 32 Tahun | Perempuan | S1 | Kecamatan Sei Tualang Raso | 20 Tahun |
| Maherni Parinduri | 53 Tahun | Perempuan | S1 | Kecamatan Teluk Nibung | 7 Tahun |
| Muhammad Husin | 33 Tahun | Laki – Laki | S2 | Dinas Perikanan | 4 Tahun |
| Rasmi Wahyudi, SE M.Si | 44 Tahun | Laki – Laki | S2 | Dinas Pangan Dan Pertanian | 19 Tahun |
| Irwansyah, S.H | 44 Tahun | Laki – Laki | S1 | Dinas Ketenagakerjaan | 8 Tahun |
| Rika Araya Kartika, SE | 40 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 13 Tahun |
| Filfino, Sh | 39 Tahun | Laki – Laki | S1 | Dinas Perpustakaan Dan Arsip | 10 Tahun |
| Habelki Taherawan Sinaga | 39 Tahun | Laki – Laki | S2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6 Tahun |
| Suhada, S.P | 51 Tahun | Laki – Laki | S1 | Dinas Pangan dan Pertanian | 32 Tahun |
| Sunarni, SE | 48 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Ketenagakerjaan | 5 Tahun |
| Darma Erita S.Pdi | 57 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 23 Tahun |
| Khariyah | 45 Tahun | Perempuan | S2 | Kecamatan Tanjungbalai Selatan | 18 Tahun |
| Roslaini Dewi | 46 Tahun | Perempuan | SMA | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 14 Tahun |
| Aryo Sigit, STP., M.M | 39 Tahun | Laki – laki | S2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4 Tahun |
| Ikaman Nilawati, SE.MM | 38 Tahun | Perempuan | S2 | Dinas Kominfio | 15 Tahun |
| Ratna Hairani, SE | 58 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Perikanan | 32 Tahun |
| Darmah Saragih, SH | 48 Tahun | Perempuan | S1 | Kecamatan Tanjungbalai Utara | 15 Tahun |
| Syamsul Efendi, SE | 45 Tahun | Laki – laki | S1 | Kecamatan Datuk Bandar | 16 Tahun |
| Gusmaini | 28 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Kesehatan | 5 Tahun |
| Darmiati, SE | 51 Tahun | Perempuan | S1 | Kecamatan Datuk Bandar Timur | 28 Tahun |
| Windy Octora Siregar | 45 Tahun | Perempuan | S2 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 22 Tahun |
| Zainab Mahmud Siregar, S.Pd.I | 43 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 16 Tahun |
| Erwin Setyawan | 41 Tahun | Laki – laki | S2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, | 18 Tahun |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------|----|--|----------|
| | | | | Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| Ipo Maharani Pohan, SE | 39 Tahun | Perempuan | S1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 Tahun |
| Romauli K.F.E. Sitanggung, SE | 47 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah | 14 Tahun |
| Muhammad Karnaen Nasution | 45 Tahun | Laki – laki | S1 | Dinas Lingkungan Hidup | 15 Tahun |
| Syamsidar, SH | 51 Tahun | Perempuan | S1 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 25 Tahun |
| Rudian Syah Nasution, ST | 29 Tahun | Laki – laki | S1 | Dinas Pekerjaan Uum dan Tata Ruang | 5 Tahun |
| Heppi Tiopian Siahaan, S.S | 44 Tahun | Perempuan | S1 | Dinas Sosial | 15 Tahun |
| Irma Suryani | 40 Tahun | Perempuan | S2 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 21 Tahun |
| Hj. Siti Ruganjah | 54 Tahun | Perempuan | S1 | Inspektorat Daerah | 21 Tahun |

Lampiran 3. Tabulasi Data Responden

| X1.1 | X1.2 | Pengawasan Internal (X1) | | | X1.5 | X1.6 |
|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | X1.3 | X1.4 | X1.5 | | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Akuntabilitas (X2)

| X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | X2.8 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Transparansi (X3)

| X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 |
|------|------|------|------|------|------|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

| Y1.1 | Y1.2 | Y1.3 | Y1.4 | Y1.5 | Y1.6 |
|------|------|------|------|------|------|
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Lampiran 4. Indicators

| Indicators | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|------|----------|-------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------------|--|
| Name | No. | Type | Missings | Mean | Median | Scale min | Scale max | Observed min | Observed max | Standard deviation | Excess kurtosis | Skewness | Cramér-von Mises p value | |
| X1.1 | 1 | MET | 1 | 4.345 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.658 | -0.674 | -0.519 | 0.000 | |
| X1.2 | 2 | MET | 1 | 4.362 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.607 | -0.618 | -0.395 | 0.000 | |
| X1.3 | 3 | MET | 1 | 4.810 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.392 | 0.664 | -1.626 | 0.000 | |
| X1.4 | 4 | MET | 1 | 4.448 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.531 | -1.241 | -0.143 | 0.000 | |
| X1.5 | 5 | MET | 1 | 4.190 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.507 | 0.280 | 0.288 | 0.000 | |
| X1.6 | 6 | MET | 1 | 4.310 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.622 | -0.615 | -0.339 | 0.000 | |
| X2.1 | 7 | MET | 1 | 4.483 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.594 | -0.444 | -0.691 | 0.000 | |
| X2.2 | 8 | MET | 1 | 4.483 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.565 | -0.713 | -0.521 | 0.000 | |
| X2.3 | 9 | MET | 1 | 4.328 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.627 | -0.629 | -0.390 | 0.000 | |
| X2.4 | 10 | MET | 1 | 4.345 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.631 | -0.631 | -0.442 | 0.000 | |
| X2.5 | 11 | MET | 1 | 4.224 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.558 | -0.215 | 0.019 | 0.000 | |
| X2.6 | 12 | MET | 1 | 4.172 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.530 | 0.221 | 0.153 | 0.000 | |
| X2.7 | 13 | MET | 1 | 4.397 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.489 | -1.877 | 0.434 | 0.000 | |
| X2.8 | 14 | MET | 1 | 4.328 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.469 | -1.483 | 0.754 | 0.000 | |
| X3.1 | 15 | MET | 1 | 4.103 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.480 | 1.221 | 0.285 | 0.000 | |
| X3.2 | 16 | MET | 1 | 4.103 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.578 | 0.002 | -0.007 | 0.000 | |
| X3.3 | 17 | MET | 1 | 4.052 | 4.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 0.654 | 0.736 | -0.433 | 0.000 | |
| X3.4 | 18 | MET | 1 | 4.534 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.499 | -2.052 | -0.142 | 0.000 | |
| X3.5 | 19 | MET | 1 | 4.069 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.763 | -1.279 | -0.120 | 0.000 | |
| X3.6 | 20 | MET | 1 | 4.086 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 0.651 | -0.607 | -0.089 | 0.000 | |
| Y1.1 | 21 | MET | 1 | 4.517 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.500 | -2.068 | -0.071 | 0.000 | |
| Y1.2 | 22 | MET | 1 | 4.466 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.499 | -2.052 | 0.142 | 0.000 | |
| Y1.3 | 23 | MET | 1 | 4.603 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.489 | -1.877 | -0.434 | 0.000 | |
| Y1.4 | 24 | MET | 1 | 4.517 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.500 | -2.068 | -0.071 | 0.000 | |
| Y1.5 | 25 | MET | 1 | 4.534 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.499 | -2.052 | -0.142 | 0.000 | |
| Y1.6 | 26 | MET | 1 | 4.414 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 0.493 | -1.939 | 0.359 | 0.000 | |

Lampiran 5. Correlations

| Correlations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | X2.8 | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | Y1.1 | Y1.2 | Y1.3 | Y1.4 | Y1.5 | Y1.6 | |
| X1.1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X1.2 | 0.723 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X1.3 | 0.187 | 0.361 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X1.4 | 0.298 | 0.459 | 0.409 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X1.5 | 0.528 | 0.617 | 0.268 | 0.517 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X1.6 | 0.708 | 0.844 | 0.312 | 0.571 | 0.743 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X2.1 | 0.236 | 0.280 | 0.319 | 0.352 | 0.268 | 0.435 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X2.2 | 0.295 | 0.295 | 0.258 | 0.371 | 0.282 | 0.457 | 0.693 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X2.3 | 0.228 | 0.187 | 0.253 | 0.336 | 0.076 | 0.314 | 0.640 | 0.723 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X2.4 | 0.170 | 0.124 | 0.264 | 0.311 | 0.011 | 0.255 | 0.613 | 0.646 | 0.935 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X2.5 | -0.023 | 0.117 | 0.194 | 0.243 | -0.089 | 0.098 | 0.453 | 0.587 | 0.677 | 0.661 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X2.6 | 0.126 | 0.181 | 0.240 | 0.216 | -0.058 | 0.204 | 0.393 | 0.529 | 0.609 | 0.699 | 0.802 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X2.7 | 0.111 | 0.329 | 0.302 | 0.245 | 0.114 | 0.219 | 0.468 | 0.493 | 0.532 | 0.506 | 0.495 | 0.268 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X2.8 | 0.416 | 0.370 | 0.244 | 0.449 | 0.391 | 0.538 | 0.360 | 0.509 | 0.514 | 0.492 | 0.246 | 0.258 | 0.561 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X3.1 | 0.105 | 0.285 | 0.287 | 0.224 | 0.273 | 0.181 | 0.248 | 0.325 | 0.231 | 0.224 | 0.299 | 0.201 | 0.559 | 0.309 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X3.2 | 0.178 | 0.041 | -0.066 | 0.242 | 0.345 | 0.151 | 0.357 | 0.217 | 0.430 | 0.328 | 0.088 | -0.058 | 0.404 | 0.447 | 0.272 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X3.3 | 0.079 | 0.170 | 0.038 | 0.281 | 0.178 | 0.172 | 0.290 | 0.259 | 0.295 | 0.207 | 0.110 | 0.024 | 0.474 | 0.506 | 0.477 | 0.487 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X3.4 | 0.016 | -0.070 | 0.342 | 0.137 | 0.008 | -0.035 | 0.293 | 0.063 | 0.378 | 0.346 | 0.189 | -0.022 | 0.333 | 0.357 | 0.201 | 0.466 | 0.443 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X3.5 | 0.056 | -0.017 | 0.044 | 0.222 | 0.145 | -0.045 | 0.003 | -0.077 | 0.241 | 0.166 | 0.085 | -0.029 | 0.250 | 0.467 | 0.075 | 0.649 | 0.373 | 0.538 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| X3.6 | 0.092 | 0.183 | 0.199 | 0.387 | 0.212 | 0.062 | 0.115 | 0.028 | 0.269 | 0.179 | 0.184 | 0.057 | 0.272 | 0.416 | 0.192 | 0.480 | 0.435 | 0.495 | 0.857 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Y1.1 | 0.244 | 0.349 | 0.413 | 0.556 | 0.497 | 0.482 | 0.436 | 0.398 | 0.340 | 0.254 | 0.202 | -0.011 | 0.360 | 0.454 | 0.352 | 0.233 | 0.182 | 0.274 | 0.223 | 0.393 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Y1.2 | 0.141 | 0.240 | 0.363 | 0.449 | 0.333 | 0.368 | 0.405 | 0.427 | 0.340 | 0.312 | 0.244 | 0.022 | 0.586 | 0.527 | 0.231 | 0.371 | 0.402 | 0.386 | 0.142 | 0.195 | 0.625 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Y1.3 | 0.264 | 0.483 | 0.417 | 0.485 | 0.442 | 0.518 | 0.718 | 0.693 | 0.593 | 0.499 | 0.388 | 0.197 | 0.657 | 0.491 | 0.321 | 0.328 | 0.333 | 0.303 | 0.212 | 0.378 | 0.698 | 0.615 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Y1.4 | 0.139 | 0.235 | 0.237 | 0.361 | 0.225 | 0.260 | 0.553 | 0.459 | 0.505 | 0.473 | 0.388 | 0.184 | 0.642 | 0.380 | 0.208 | 0.591 | 0.340 | 0.343 | 0.359 | 0.340 | 0.448 | 0.694 | 0.698 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Y1.5 | 0.489 | 0.329 | 0.166 | 0.332 | 0.349 | 0.410 | 0.525 | 0.308 | 0.267 | 0.236 | 0.003 | -0.022 | 0.403 | 0.430 | 0.345 | 0.406 | 0.391 | 0.307 | 0.175 | 0.230 | 0.482 | 0.455 | 0.515 | 0.482 | 1.000 | 0.000 | |

Lampiran 6. Raw Data

| Raw data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2.7 | X2.8 | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | Y1.1 | Y1.2 | Y1.3 | Y1.4 | Y1.5 | Y1.6 |
| 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Lampiran 7. Outer Loadings

| Outer loadings - Matrix | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | X1. Pengawasan Internal | X2. Akuntabilitas | X3. Transparansi | Y1. Kinerja Pemerintah Daerah |
| X1.1 | | 0.725 | | |
| X1.2 | | 0.861 | | |
| X1.3 | | 0.528 | | |
| X1.4 | | 0.741 | | |
| X1.5 | | 0.812 | | |
| X1.6 | | 0.916 | | |
| X2.1 | | | 0.785 | |
| X2.2 | | | 0.846 | |
| X2.3 | | | 0.893 | |
| X2.4 | | | 0.863 | |
| X2.5 | | | 0.706 | |
| X2.6 | | | 0.619 | |
| X2.7 | | | 0.743 | |
| X2.8 | | | 0.685 | |
| X3.1 | | | | 0.505 |
| X3.2 | | | | 0.795 |
| X3.3 | | | | 0.747 |
| X3.4 | | | | 0.714 |
| X3.5 | | | | 0.794 |
| X3.6 | | | | 0.785 |
| Y1.1 | | | | 0.785 |
| Y1.2 | | | | 0.769 |
| Y1.3 | | | | 0.875 |
| Y1.4 | | | | 0.804 |
| Y1.5 | | | | 0.769 |
| Y1.6 | | | | 0.733 |

Lampiran 8. Cross Loading

| Discriminant validity - Cross loadings | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | X1. Pengawasan Internal | X2. Akuntabilitas | X3. Transparansi | Y1. Kinerja Pemerintah Daerah |
| X1.1 | 0.753 | 0.229 | 0.116 | 0.361 |
| X1.2 | 0.868 | 0.293 | 0.086 | 0.428 |
| X1.4 | 0.728 | 0.385 | 0.329 | 0.561 |
| X1.5 | 0.832 | 0.169 | 0.243 | 0.483 |
| X1.6 | 0.936 | 0.389 | 0.092 | 0.521 |
| X2.1 | 0.391 | 0.819 | 0.290 | 0.672 |
| X2.2 | 0.420 | 0.851 | 0.144 | 0.581 |
| X2.3 | 0.284 | 0.901 | 0.422 | 0.518 |
| X2.4 | 0.220 | 0.867 | 0.320 | 0.453 |
| X2.5 | 0.096 | 0.735 | 0.167 | 0.282 |
| X2.7 | 0.251 | 0.731 | 0.452 | 0.637 |
| X3.2 | 0.238 | 0.395 | 0.810 | 0.501 |
| X3.3 | 0.224 | 0.359 | 0.709 | 0.410 |
| X3.4 | 0.020 | 0.330 | 0.736 | 0.371 |
| X3.5 | 0.095 | 0.132 | 0.853 | 0.307 |
| X3.6 | 0.238 | 0.209 | 0.816 | 0.418 |
| Y1.1 | 0.536 | 0.428 | 0.334 | 0.780 |
| Y1.2 | 0.391 | 0.496 | 0.394 | 0.767 |
| Y1.3 | 0.545 | 0.755 | 0.405 | 0.876 |
| Y1.4 | 0.308 | 0.634 | 0.518 | 0.807 |
| Y1.5 | 0.456 | 0.402 | 0.399 | 0.769 |
| Y1.6 | 0.529 | 0.427 | 0.441 | 0.735 |

Lampiran 9. Construct reliability and validity

| Construct reliability and validity - Overview | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | Cronbach's alpha | Composite reliability (rho_a) | Composite reliability (rho_c) | Average variance extracted (AVE) |
| X1. Pengawasan Internal | 0.883 | 0.892 | 0.915 | 0.684 |
| X2. Akuntabilitas | 0.903 | 0.918 | 0.924 | 0.672 |
| X3. Transparansi | 0.845 | 0.853 | 0.890 | 0.619 |
| Y1. Kinerja Pemerintah Daerah | 0.879 | 0.890 | 0.909 | 0.625 |

Lampiran 10. Collinearity Statistics

| Collinearity statistics (VIF) - Inner model - Matrix | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | X1. Pengawasan Internal | X2. Akuntabilitas | X3. Transparansi | Y1. Kinerja Pemerintah Daerah |
| X1. Pengawasan Internal | | | | 1.164 |
| X2. Akuntabilitas | | | | 1.293 |
| X3. Transparansi | | | | 1.178 |
| Y1. Kinerja Pemerintah Daerah | | | | |

Lampiran 11. R-square

| R-square - Overview | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------|--|
| | R-square | R-square adjusted | |
| Y1. Kinerja Pemerintah Daerah | 0.656 | 0.637 | |

Lampiran 12. F-square

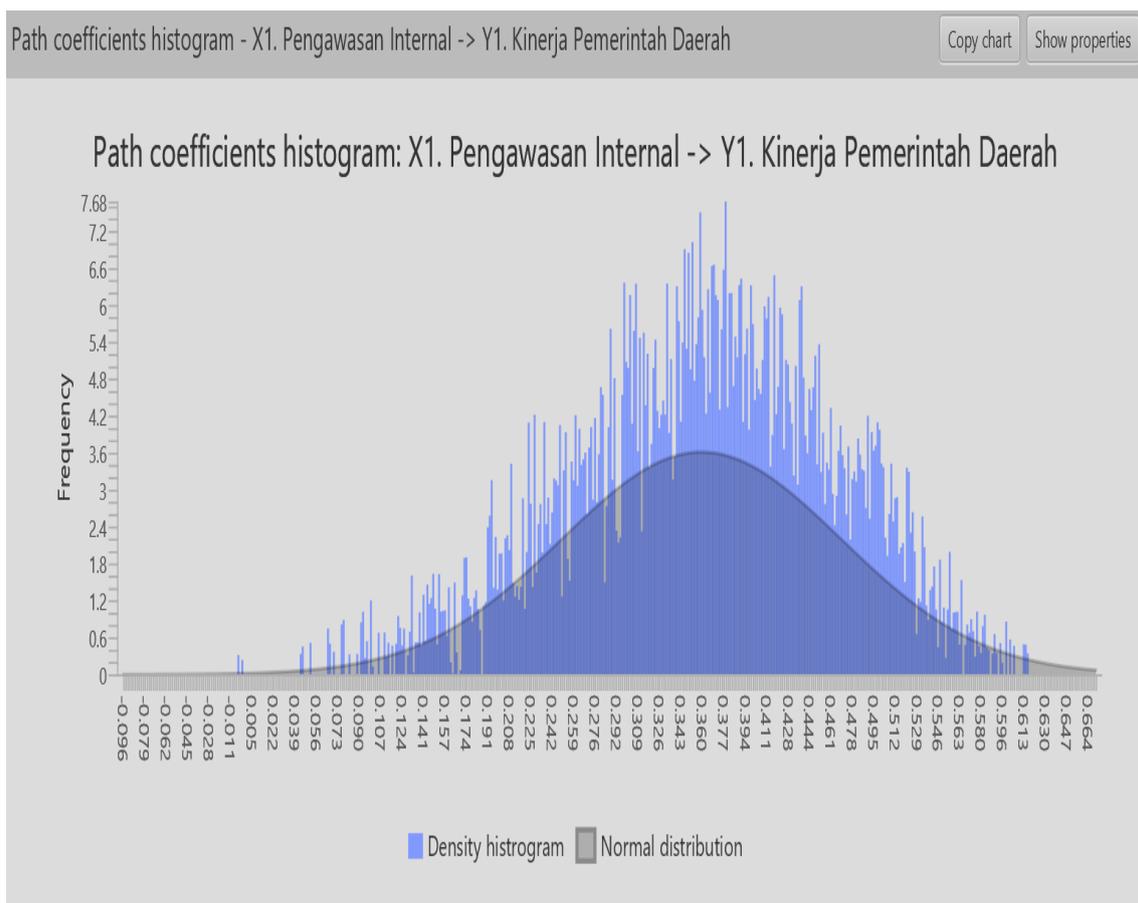
| f-square - Matrix | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | X1. Pengawasan Internal | X2. Akuntabilitas | X3. Transparansi | Y1. Kinerja Pemerintah Daerah |
| X1. Pengawasan Internal | | | | 0.326 |
| X2. Akuntabilitas | | | | 0.437 |
| X3. Transparansi | | | | 0.191 |
| Y1. Kinerja Pemerintah Daerah | | | | |

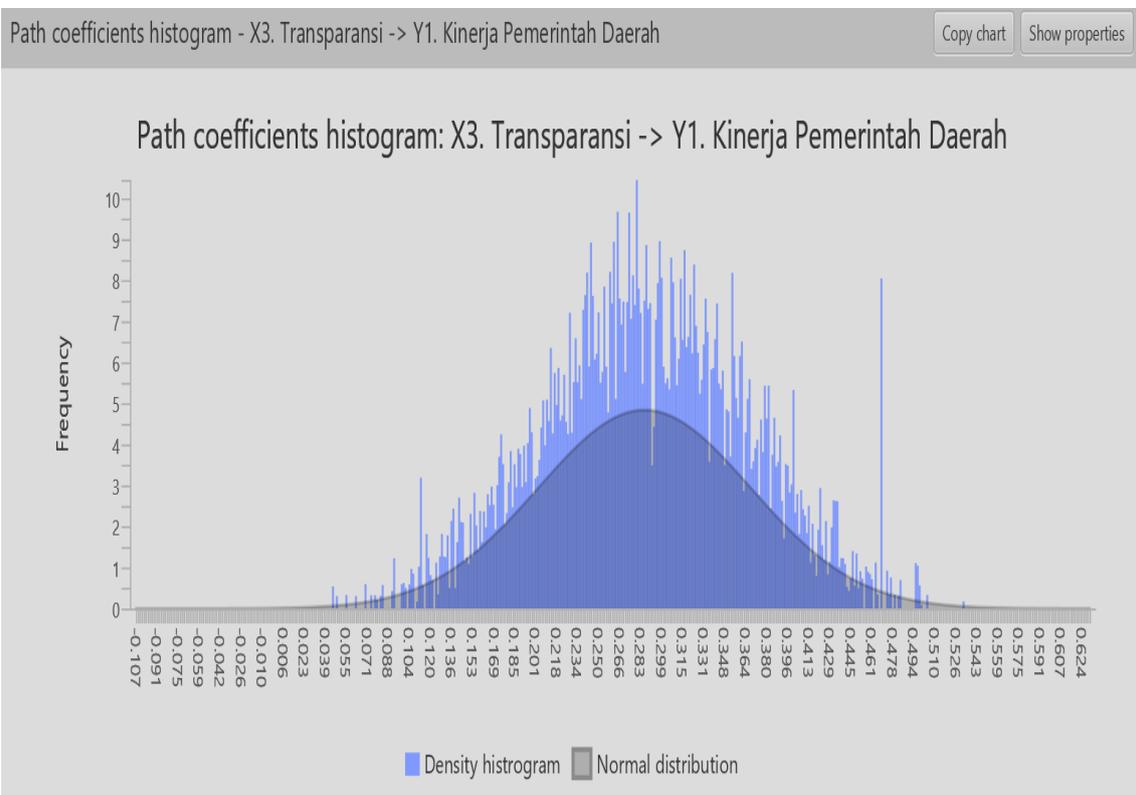
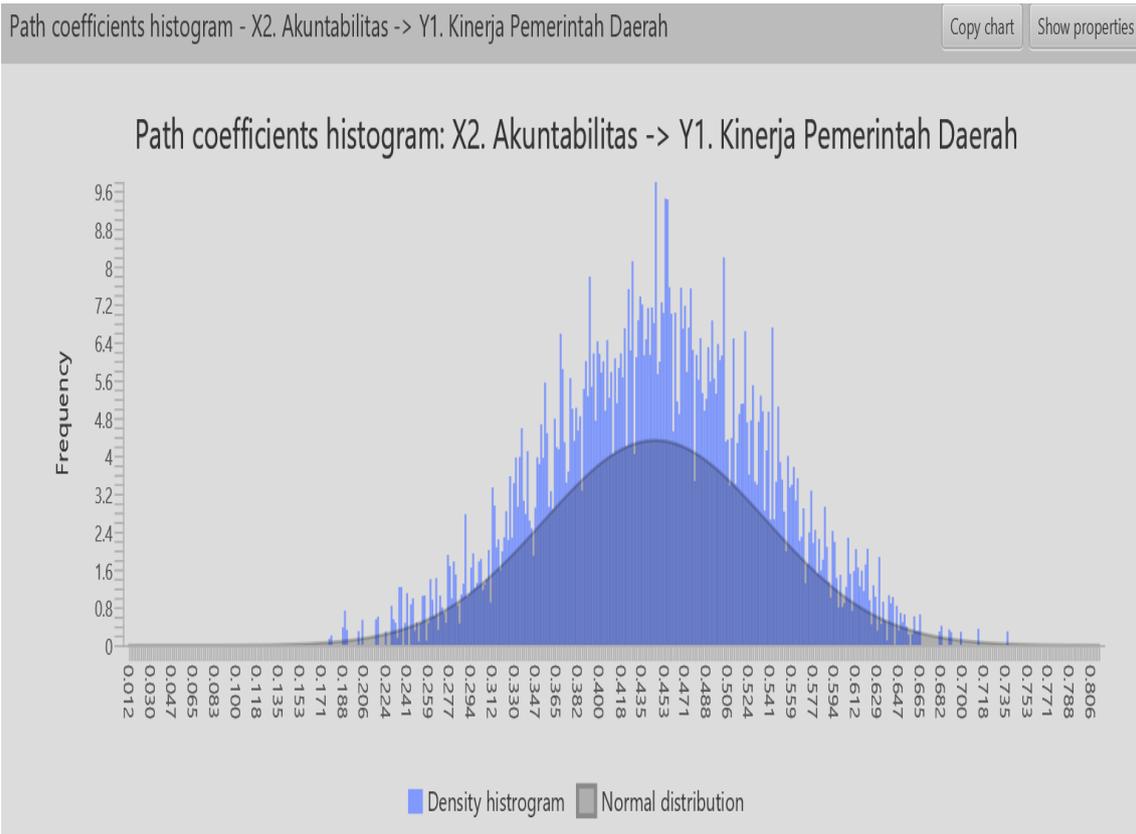
Lampiran 13. Uji Hipotesis (Direct effect)

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

| | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | T statistics (O/STDEV) | P values |
|--|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------|
| X1. Pengawasan Internal -> Y1. Kinerja Pemerintah Daerah | 0.361 | 0.359 | 0.111 | 3.269 | 0.001 |
| X2. Akuntabilitas -> Y1. Kinerja Pemerintah Daerah | 0.441 | 0.446 | 0.092 | 4.785 | 0.000 |
| X3. Transparansi -> Y1. Kinerja Pemerintah Daerah | 0.278 | 0.286 | 0.082 | 3.376 | 0.001 |

Lampiran 14. Histogram direct effect





DOKUMENTASI PENELITIAN KE 34 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)



(Dinas Komunikasi dan Informatika)



(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)



(Sekretariat DPRD)



(Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat).



(Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata)



(Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana)



(Dinas Lingkungan Hidup)



(Kecamatan Datuk Bandar)



(Kecamatan Datuk Bandar Timur)



(Dinas Pangan dan Pertanian)



(Kecamatan Teluk Nibung)



(Inspektorat Daerah)



(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)



(Dinas Sosial)



(Dinas Ketenagakerjaan)



(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)



(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)



(Dinas Perdagangan dan Perindustrian)



(Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)



(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)



(Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)



(Dinas Perhubungan)



(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)



(Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)



(Sekretariat Daerah)



(Kecamatan Tanjungbalai Utara)



(Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia)



(Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)



(Kecamatan Tanjungbalai Selatan)



(Kecamatan Sei Tulang Raso)



(Dinas Perikanan)



(Dinas Kesehatan)



(Dinas Pendidikan)



(Kesatuan Polisi Pamong Praja)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/10/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 04/10/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ellen Angelina
NPM : 2005170002
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1 : Pengaruh penerapan Anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan dan ketaatan pada peraturan perundang undangan terhadap akuntabilitas kinerja, identifikasi masalah : 1. Masih belum terintegrasi nya penerapan Anggaran berbasis kinerja dalam akuntabilitas kinerja, 2. Kurang nya komitmen dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapatkan perhatian, 3. Masih belum ada penetapan sanksi bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja. Judul 2 : Pengaruh kejelasan sasaran Anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja, identifikasi masalah : 1. Kurang nya pemahaman dan tanggung jawab atas pencapaian sasaran Anggaran, 2. Ada nya rasa ketidakpedulian terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien, 3. Kurang nya melakukan pengontrolan dan menilai pada seluruh aktivitas. Judul 3 : Faktor faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, identifikasi masalah : 1. Masih belum tersosialisasi kan nya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja, 2. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja, 3. Kurang nya kinerja akuntabilitas yang maksimal dan menyeluruh

Rencana Judul : 1. Pengaruh penerapan Anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan dan ketaatan pada peraturan perundang undangan terhadap akuntabilitas kinerja
2. Pengaruh kejelasan sasaran Anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja
3. Faktor faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Ellen Angelina)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/10/2023

Nama Mahasiswa : Ellen Angelina
NPM : 2005170002
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 04/10/2023
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA (07 Oktober 2023)

Judul Disetujui^{**)}

"Pengaruh pengawasaan Intecnel Akutabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemecintah Daerah (Studi pada OPD Kota Tanjung Balai)"

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zuhra Hanum, S.E., M.Si.)

Medan,

Desember 2023

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Msi, AK, CA)

Keterangan:

*) Disisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Disisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : E L L E N A N G E L I N A

NPM : 2 0 0 5 1 7 0 0 0 2

Tempat/Tgl Lahir : T A N J U N G B A L A I 0 6 J A N U A R I
2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J L N . S . P A R M A N G G . B A T U N O
1 8 K O T A T A N J U N G B A L A I

Tempat Penelitian: K A N T O R W A L I K O T A K O T A T A
N J U N G B A L A I

Alamat Penelitian : J L N . J E N D R A L S U D I R M A N K O
T A T A N J U N G B A L A I

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Selanjutnya saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Sekretaris Jurusan

(Riva Urba Harahap, SE., M.Si., Ak., CA., CPA)

Wassalam
Pemohon

(Ellen Angelina)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 61/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 27 Jumadil Akhir 1445 H
09 Januari 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Walikota Kota Tanjungbalai
Jln. Jendral Sudirman Kota Tanjungbalai
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

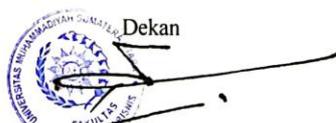
Nama : Ellen Angelina
Npm : 2005170002
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota Tanjungbalai)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Jemari SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mahasiswa sudah itu agar dapat
menjadi sarjana

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f/umsuMEDAN](#) [ig/umsuMEDAN](#) [t/umsuMEDAN](#) [y/umsuMEDAN](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 61/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ellen Angelina
N P M : 2005170002
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi
Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota
Tanjungbalai)

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 Januari 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Jumadil Akhir 1445 H
09 Januari 2024 M



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Pertinggal



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM 5,5 Email : bapperida@tanjungbalaikota.go.id
TANJUNGBALAI – 21361

IZIN RISET

Nomor : 000.9.6.1/ 0056 /Bapperida/2024

- Membaca** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungbalai Nomor 070/73/BKB&P/2024 tentang Rekomendasi Izin Riset tanggal 29 Januari 2024.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
5. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2015 tentang izin pelaksanaan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan di Kota Tanjungbalai.
- Menyatakan** : **Diizinkan** untuk melakukan kegiatan Riset kepada:
- Nama : **ELLEN ANGELINA**
NPM : 2005170002
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Alamat Instansi : Jl. Mukhtar Basri No.3 Medan
Judul Riset : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kota Tanjungbalai)
Lokasi : Kota Tanjungbalai
Lama maksimal : 3 (tiga) bulan
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Untuk** hal ini kami tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Riset dimaksud dengan ketentuan:
- Selama riset harus memberi laporan;
 - Sesudah riset berakhir untuk meninggalkan daerah diwajibkan menyampaikan hasil risetnya kepada Bapperida Kota Tanjungbalai;
 - Izin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
 - Waktu riset dapat diperpanjang dengan mengajukan surat izin ini kembali;
 - Bila hasil riset tidak disampaikan maka merupakan penilaian negatif bagi Lembaga bersangkutan;
- Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila riset tidak memenuhi ketentuan

Dikeluarkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 31 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
ZUL ABDIMAN, S.Kom, MM.
NIP : 19741228 200003 1 003

* UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan DSE-E

* Dokumen aslinya dapat diunduh melalui QR Code



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM 5,5 Email : bapperida@tanjungbalaikota.go.id
TANJUNGBALAI – 21361

IZIN RISET

Nomor : 000.9.6.1/ 0751 /Bapperida/2024

- Membaca** : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungbalai Nomor 070/73 /BKB&P/2024 tentang Rekomendasi Izin Riset tanggal 29 Januari 2024.
2. Surat Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai Nomor : 000.9.6.1/0056/Bapperida/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Izin Riset
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
5. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2015 tentang izin pelaksanaan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan di Kota Tanjungbalai.

Menyatakan : **Diizinkan** untuk melakukan perpanjangan kegiatan Riset kepada:

Nama : **ELLEN ANGELINA**
NPM : 2005170002
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Alamat Instansi : Jl. Mukhtar Basri No.3 Medan
Judul Riset : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kota Tanjungbalai
Lokasi : Seluruh OPD se- Kota Tanjungbalai
Lama maksimal : 3 (tiga) bulan
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Untuk hal ini kami tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Riset dimaksud dengan ketentuan:

- Selama riset harus memberi laporan;
- Sesudah riset berakhir untuk meninggalkan daerah diwajibkan menyampaikan hasil risetnya kepada Bapperida Kota Tanjungbalai;
- Izin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- Waktu riset dapat diperpanjang dengan mengajukan surat izin ini kembali;
- Bila hasil riset tidak disampaikan maka merupakan penilaian negatif bagi Lembaga bersangkutan;

Izin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila riset tidak memenuhi ketentuan

Dikeluarkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 29 Mei 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
ZUL ABDIMAN, S.Kom, MM.
NIP : 19741228 200003 1 003

* UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR E

*Dokumen asli dapat diunduh melalui Qr Code



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ellen Angelina
NPM : 2005170002
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kota Tanjungbalai)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|------------------------------|---|---------|-------------|
| Bab 1 | Formulasi masalah belum tepat, uraian variabel X, dan deskripsi masalah, gaya esai. | 5/3 24 | 3/1 |
| Bab 2 | uraian konsep variabel teori variabel ganda. | 5/3 24 | 3/1 |
| Bab 3 | teknik pengumpul data, bentuk response siapa. gunakan SEM | 5/3 24 | 2/1 |
| Daftar Pustaka | gunakan mendeley, sitasi arif dan umu | 5/3 24 | 3/1 |
| Instrumen Pengumpulan Data | _____ | | |
| Persetujuan Seminar Proposal | _____ | | |

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Maret 2024

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ellen Angelina
NPM : 2005170002
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kota Tanjungbalai)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|------------------------------|--|---------|-------------|
| Bab 1 | Tujuan peneliti awal. | 8/3 24 | 3/1 |
| Bab 2 | Spesi penelitian, indikator dan variabel awal: kerangka beraturan konseptual | | 3/1 |
| Bab 3 | Metode pengumpulan data - gambar SEM. | 8/3 24 | 3/1 |
| Daftar Pustaka | Referensi dosen dan umum | 8/3 24 | 3/1 |
| Instrumen Pengumpulan Data | Bentuk angket | 8/3 24 | 3/1 |
| Persetujuan Seminar Proposal | | | |

Medan, Maret 2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si)

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ellen Angelina
NPM : 2005170002
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kota Tanjungbalai)

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| Bab 1 | — | | |
| Bab 2 | — | | |
| Bab 3 | — | | |
| Daftar Pustaka | — | | |
| Instrumen Pengumpulan Data | <i>angket pribadi</i> | | |
| Persetujuan Seminar Proposal | <i>ACC draft skripsi</i> | <i>22/3/24</i> | <i>[Signature]</i> |

Medan, Maret 2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si)

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

[Signature]
(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 27 Maret 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ellen Angelina*
NPM. : 2005170002
Tempat / Tgl.Lahir. : Tanjungbalai, 06 Januari 2001
Alamat Rumah : Jln. S. Parman gg. Batu Lk.III
Judul Proposal : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota Tanjungbalai)

Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|------------|---|
| Judul | |
| Bab I | <i>katr belakang masalah</i> |
| Bab II | <i>keni dituriken ternyata konsep</i> |
| Bab III | |
| Lainnya | <i>istematika penulisan keuri buku pedoman</i> |
| Kesimpulan | <input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus |

Medan, 27 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Pemanding

Pandapotran Ritonga, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 27 Maret 2024** menerangkan bahwa:

Nama : Ellen Angelina
NPM : 2005170002
Tempat / Tgl.Lahir : Tanjungbalai, 06 Januari 2001
Alamat Rumah : Jln.S. Parman gg. Batu Lk.III
Judul Proposal : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota Tanjungbalai)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA**

Medan, 27 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembanding

Pandapotran Ritonga, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

16/5/24

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Belum pernah हुई है आप मिलेंगे
आप ही हैं हमारे

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1372/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 12 Dzulqa'dah 1445 H
20 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Walikota Kota Tanjungbalai
Jln. Jendral Sudirman Kota Tanjungbalai
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ellen Angelina
N P M : 2005170002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota Tanjungbalai)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Jahuri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM 5,5 Email : bapperida@tanjungbalaikota.go.id
TANJUNGBALAI – 21361

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2 / 0897 /Bapperida/2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Tanjungbalai dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : **ELLEN ANGELINA**
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. NIM : 2005170002
4. Program Studi : Akuntansi
5. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar mahasiswa/i tersebut telah selesai melaksanakan survei di Kota Tanjungbalai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kota Tanjungbalai) " pada 34 (Tiga Puluh Empat) Organisasi Perangkat Daerah se- Kota Tanjungbalai terhitung mulai tanggal 29 Mei s/d 14 Juni 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 24 Juni 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dilandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
ZUL ABDIMAN, S.Kom, MM.
NIP : 19741228 200003 1 003

* UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

*Dokumen asli dapat diunduh melalui Qr Code

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Ellen Angelina
NPM : 2005170002
Tempat, tanggal lahir : Tanjungbalai, 06 Januari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara
Alamat : JLN. S.PARMAN GG. BATU LK.III
No. Telephone : 0821-8425-9700
E-mail : ellen.angelina06@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syafri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ratna
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JLN. S.PARMAN GG. BATU LK.III
No. Telephone : 0813-9644-6245
E-mail : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 132407 Tanjungbalai
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP N 1 Tanjungbalai
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA N 3 Tanjungbalai
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara